



BerAKHLAK
berorientasi melayani, jujur, disiplin, bertanggung jawab, berkeadilan, dan berprestasi

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN Kinerja

Triwulan I 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN
MAROS, 2025

TIM PENYUSUN:

Dr. A. Indra Jaya Asaad, S. Pi, M. Sc

Rahmadhany Natsir. S. Sos

Ahmadirrahman Fajrihanif

Muhammad Yusuf. S. Sos. M.Si

Anton Mulyawan S.H

Tenri Santy S. Kel

Andi Bahtiar. S. St, Pi

Ansar S.I, Pust

Husain

Dahlia

Chairil Anwar S. Kom

Ahmad Syafii

SAMBUTAN KEPALA BALAI



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I tahun 2025 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dapat terselesaikan dengan baik. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pencapaian visi dan misi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) selama tahun anggaran 2025, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban BRPBAPPP dalam mewujudkan *good governance and good government* berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai pejabat eselon II ke atas untuk mempertimbangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Laporan kinerja ini mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPBAPPP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya, sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI secara umum dan BRPBAPPP pada khususnya, telah menerapkan metode pengukuran kinerja berbasis *Logical Framework Analysis* sesuai dengan peraturan Menteri KP RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Kinerja BRPBAPPP diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja (SK)

sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BRPBAPPP tahun 2024 yang merupakan kontrak kinerja tahunan. Selanjutnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh dan dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya pada tahun 2025.

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja BRPBAPPP ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya

Maros, 18 April 2025

Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau dan Penyuluhan Perikanan



A. Indra Jaya Asaad

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN:	ii
SAMBUTAN KEPALA BALAI	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	2
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. KERAGAMAN SDM BRPBAPPP.....	9
E. POTENSI DAN PERMASALAHAN	15
F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENCANA STRATEGIS	20
B. VISI	22
C. MISI.....	23
D. TUJUAN	24
E. SASARAN	24
F. RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025	26
G. PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025	29
G. PENGUKURAN KINERJA	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN I TAHUN 2025	35
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	40
C. CAPAIAN KINERJA BRPBAPPP	40
D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA BRPBAPPP	89
BAB IV PENUTUP	92
A. CAPAIAN KINERJA UTAMA	92
B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	97
C. SARAN DAN REKOMENDASI.....	97
D. KESIMPULAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025	xiv
Tabel 2. Pembagian Tugas Tim Kerja Lingkup BRPBAPPP	6
Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja	10
Tabel 4. Jumlah ASN BRPBAPPP 2025	11
Tabel 5. Anggaran BRPBAPPP Triwulan I TA. 2025	17
Tabel 6. Indikator Kinerja/Output dan capaiannya untuk tahun 2025-2029	21
Tabel 7. Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	25
Tabel 8. Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 9. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Riset Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 10. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Pusat Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 (Per Januari 2025)	30
Tabel 11. Data Anggaran TA. 2024 Lingkup BRPBAPPP	31
Tabel 12. Bobot validasi IKK.....	33
Tabel 13. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025	36
Tabel 14. Capaian IKU Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025	41
Tabel 15. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	44
Tabel 16. Realisasi capaian berdasarkan Klasifikasi kelas dan bidang usaha yang disuluh Triwulan I Tahun 2025	45
Tabel 17. Realisasi Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025	46
Tabel 18. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) dengan Satminkal Lain.....	48
Tabel 19. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	50
Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU ini Triwulan I Tahun 2025 dengan Satker Lain	53
Tabel 21. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	54
Tabel 22. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) triwulan I tahun 2025 dengan Satker Lain.	57
Tabel 23. Capaian IK Nilai PNBK Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	61

Tabel 24. Nilai PNPB BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2025 ini berasal dari penerimaan fungsional dan umum dari beberapa akun	62
Tabel 25. Penerimaan PNPB BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025	62
Tabel 26. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lain Lingkup Pusluh.....	63
Tabel 27. Capaian IK Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit).....	65
Tabel 28. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lain Lingkup Pusluh.....	66
Tabel 29. Capaian IK Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket).....	67
Tabel 30. Capaian IK Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok).....	68
Tabel 31. Capaian IK Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang).....	69
Tabel 32. Capaian Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	70
Tabel 33. Capaian Kinerja IK 10 Triwulan I Tahun 2025	71
Tabel 34. capaian Indikator Kinerja Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	72
Tabel 35. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lingkup Pusluh KP.	74
Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja IK ini Pada Triwulan I tahun 2025.....	76
Tabel 37. Progress Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) sampai dengan Maret 2025	76
Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja (IK) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP Triwulan I tahun 2025	77
Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja NKPA Triwulan I TA 2025	79
Tabel 40. Progress IK NKPA Jan-Maret 2025.....	79
Tabel 41. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks).....	80
Tabel 42. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%).....	82
Tabel 43. Perbandingan Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%) triwulan I tahun 2025 dengan Satker Lain.	82
Tabel 44. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025.....	84
Tabel 45. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024.....	84
Tabel 46. Revisi DIPA BRPBAPPP Triwulan I tahun 2025.....	85
Tabel 47. Realiasi Anggaran Per Indikator Kinerja Manajerial Triwulan I Tahun 2025.....	86
Tabel 48. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025.....	90
Tabel 49. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRPBAPPP	xi
Gambar 2. Struktur Organisasi BRPBAPPP	3
Gambar 3. Capaian Kinerja IKU Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id	35
Gambar 4. Daftar Capaian BRPBAPPP Tahun 2024 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id	36
Gambar 5. Kunjungan Kelompok dalam monitoring dan motivasi pemanfaatan bantuan pemerintah dalam penggunaan alat pengolahan Bakso Ikan	47
Gambar 6. Musyawarah/Pertemuan dalam rangka Pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sipakatutu.	47
Gambar 7. Kegiatan Penilaian Kelas Kelompok Perikanan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Maret 2025 di Kelompok Poklahsar “Marlo Jaya” Desa Mattirotasi Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.	52
Gambar 8. Kegiatan Kegiatan penumbuhan kelompok Katonik Super Desa Poreang	57
Gambar 9. Screenshoot Rekapan PNBPN Triwulan I Tahun 2025	63
Gambar 10. Kegiatan Pembentukan Gabungan Kelompok Kelautan Dan Perikanan Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo	65
Gambar 11. Screenshoot aplikasi SIDAK KKP satker BRPBAPPP Maros	73
Gambar 12. Dashbaord Kinerjaku Level 3 BRPBAPPP	92

DAFTAR GRAFIK

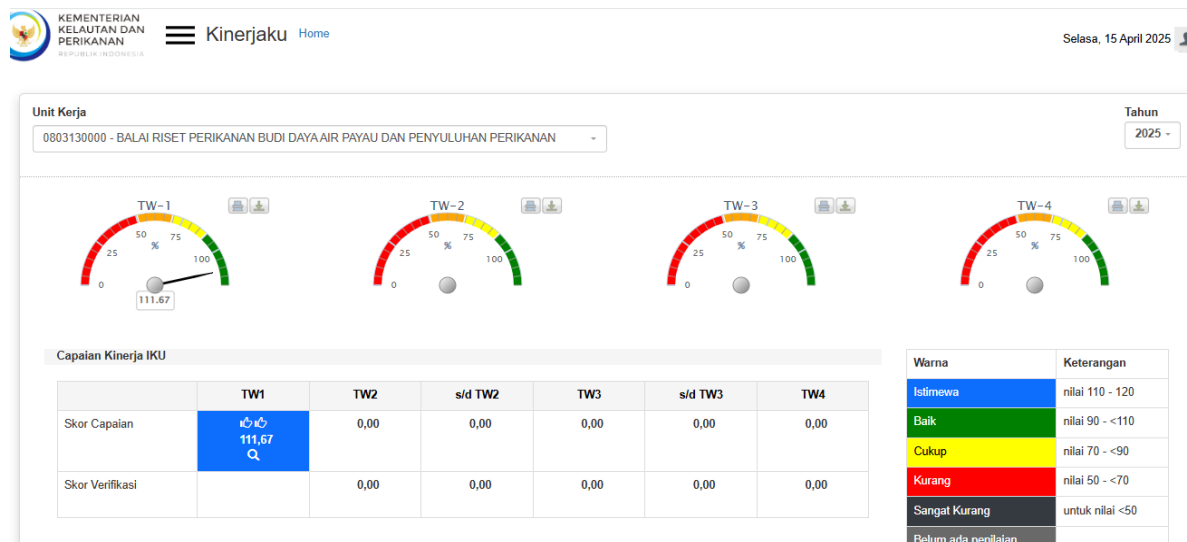
Grafik 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan	11
Grafik 2. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	12
Grafik 3. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	13

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) dalam upaya untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja di seluruh program kerja BRPBAPPP didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dengan metode *Logical Framework* yang diterapkan pada sasaran strategis dalam Rencana Strategi (Renstra) BRPBAPPP Tahun 2025-2029, yang diikuti dengan rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja tahunan secara konsisten dan berkesinambungan.

Merujuk pada PERMEN PanRB NO 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka dibuatkan LKj dimana di dalamnya memuat perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan nilai akuntabilitas kinerja, Dan didukung pula oleh KEPMEN-KP Nomor 91/2024 mengenai Rencana Kerja KKP Tahun 2025.

Sehingga pada triwulan 1 tahun 2025, BRPBAPPP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 4 Sasaran Strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPBAPPP di tingkat korporat selama tahun 2024 sebesar 111,67% sebagaimana dashboard sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut :



Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <https://kinerjaku.kkp.go.id/> Tahun 2025

Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRPBAPPP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada triwulan I tahun 2025. Ketiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 111,67%, baru 7 IK yang mencapai target triwulan sebagian IK perhitungannya dilakukan akhir tahun. Adapun IK yang capaiannya melebihi target triwulan I tahun 2025 antara lain : IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar); IKU Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit); IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%); IKM Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP. Rincian capaian indikator kinerja yang terdapat target triwulan I tahun 2025 pada masing-masing sasaran strategis, sesuai dengan nilai NKO :

1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 4 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - 1) Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 5005 kelompok, capaian triwulan I

- sebesar 150 Kelompok dari target triwulan I sebesar 180 Kelompok (120%), berstatus biru.
- 2) Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 168 kelompok, capaian triwulan I sebesar 150 Kelompok dari target triwulan I sebesar 180 Kelompok (120%), berstatus biru.
 - 3) Nilai PNBPN Satker BRPBAPPP (Rupiah Miliar) target tahunan sebesar 1,6238 kelompok, capaian triwulan I sebesar 0,20 Rupiah Miliar dari target pertriwulan sebesar 0,15 Rupiah Miliar (120%), berstatus berwarna biru.
 - 4) Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit) target tahunan sebesar 43 Unit, capaian triwulan I sebesar 2 Unit dari target triwulan I sebesar 3 Unit (120%), berstatus biru.
2. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 2 Indikator Pendukung yaitu :
- 1) Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket) target tahunan sebesar 1 Paket dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
 - 2) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 1 Paket dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
3. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 2 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
- 1) Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang) target tahunan sebesar 18 Orang dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
 - 2) Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang) target tahunan sebesar 12 Orang dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, memiliki 8 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :

- 1) Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen), target tahunan sebesar 1 Dokumen dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025
- 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%), target tahunan sebesar 85% dan capaian triwulan I sebesar 85% dari target triwulan I sebesar 85% (100%), berstatus hijau.
- 3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 92 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan persemester tahun 2025.
- 4) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 81 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 71,50 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
- 6) Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks), target tahunan sebesar 81 Indeks dan belum ada capaian karena pengukurannya dilakukan persemester tahun 2025.
- 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%), target tahunan sebesar 80% dan capaian triwulan I sebesar 100% dari target triwulan I sebesar 80% (120%), berstatus biru.
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%) target tahunan sebesar 80% dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	TARGET 2025	TARGET MARET	Capaian MARET	%	TARGET s/d MARET	Capaian s/d MARET	%
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						113,33			113,33	
IKSK. 01.01	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5,00 5,00	150,00	180,00	120,00	150,00	180,00	120,00
IKSK. 01.02	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	168,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
IKSK. 01.03	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	510,00	6,00	10,00	120,00	6,00	10,00	120,00
IKSK. 01.04	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	Rupiah Milyar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,62	0,15	0,20	120,00	0,15	0,20	120,00
IKSK. 01.05	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	43,00	2,00	3,00	120,00	2,00	3,00	120,00
S.02	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK. 02.01	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 02.02	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S.03	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK. 03.01	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 03.02	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	12,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target MA RET	Capaian MAR ET	%	Target s/d MA RET	Capaian s/d MAR ET	%
	Teknis di BRPBAPPP (Orang)										
S.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00	
IKSK. 04.01	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00
IKSK. 04.03	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.04	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.05	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.06	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
IKSK. 04.08	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <https://kinerjaku.kkp.go.id/> Tahun 2025

Meskipun kinerja BRPBAPPP selama triwulan I termasuk istimewa, namun dilihat dari NKO triwulan I tahun 2024 sebesar 116,37,% dengan NKO triwulan I tahun 2025 sebesar 111,67% mengalami penurunan NKO sebesar 47%. Beberapa permasalahan yang terjadi di pada triwulan I tahun 2025 beserta rekomendasinya sebagai berikut :

- a) Belum terbit nomenklatur organisasi dan tata kerja BRPBAPPP yang baru terkait perubahan tugas pokok dan fungsi BRPBAPPP sehingga diperlukan koordinasi

dengan Sekretariat BPPSDM KP KP maupun Pusat serta internal BRPBAPPP secara berkala untuk menyampaikan progress dan informasi terbaru terkait pembahasan nomenklatur organisasi dan tata kerja balai yang baru.

b) IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan ketat secara baik, guna memastikan capaian akhir tahun dapat terealisasi sesuai target yang telah disepakati.

c) Verifikasi capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKU, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuatu bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

d) Adanya perubahan format yang disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional.

Terkait permasalahan diatas, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh BRPBAPPP yakni :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat BRSDM KP maupun Pusat serta internal BRPBAPPP secara berkala untuk menyampaikan progress dan informasi terbaru terkait pembahasan nomenklatur organisasi dan tata kerja balai yang baru.
2. Selalu memonitoring IKU yang memiliki target tahunan sehingga bisa tercapai pada akhir tahun.
3. Selalu melakukan Sosialisasi terkait Dokumen Perencanaan yang mengikuti jenjang jabatan Fungsional Penyuluhan sehingga para penyuluh tidak bingung dalam pengumpulan data dukung capaian.

Laporan Kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh Stakeholder BRPBAPPP, Laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja BRPBAPPP

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sehingga capaian kinerja dari BRPBAPPP ini tidak hanya sebagai laporan saja, namun dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja (LKj) triwulan I tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkup BRPBAPPP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Rancangan RPJMN tahun 2025-2029 menekankan pada pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan tersebut merupakan program presiden terpilih dan arah pembangunan jangka panjang nasional. Sasaran utama pembangunan nasional ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN 2025-2029. Target yang akan dicapai pada tahun 2029 adalah:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju

GNI Per Kapita : 7.400-8.240

USD Kontribusi PDB Maritim :

9,1% Kontribusi PDB

Manufaktur : 21,9%

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

4,5-5% (tingkat kemiskinan ekstrim 0%* di tahun

kedua) Rasio Gini 0,372-0,375

Kontribusi PDRB KTI 23,3 %

3. Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat

Global Power Index berada di rangking 29

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59

5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission*

Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 2,37%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 77,20

Tahun 2025-2029 merupakan pentahapan pertama dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Tahap pertama RPJPN bertujuan untuk membentuk penguatan transformasi. Pada tahap pertama ini, diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. peningkatan kualitas sumber daya manusia

B. TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPBAPPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian laporan kinerja triwulan I tahun 2025
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPBAPPP untuk meningkatkan kinerja.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No : 75/PERMEN-KP/2020 adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan



Sumber : Permen KP No. 74/PERMEN-KP/2020

Gambar 2. Struktur Organisasi BRPBAPPP

Sesuai dengan ST Kepala BRPBAP3 Maros Nomor B.4512/BPPSDM-BRPBAPPP/KP.440/IX/2023 tanggal 11 September 2023 untuk mendukung tugas BRPBAPPP Maros, Kepala BRPBAPPP Maros dibantu oleh 2 timja yaitu Timja Manajerial (dengan jumlah anggota 79 orang) dengan uraian tugas dibawah ini :

- Pelaksanaan pemanfaatan aset dalam rangka pemenuhan target PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK
- Meningkatkan Profesionalitas ASN
- Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di satuan kerja BRPBAPPP serta menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon III untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik

- Memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- Mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA
- Menjalin kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPBAPPP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama.
- Melaksanakan kegiatan BRPBAPPP yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBAPPP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- Mendukung administrasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan, menyusun rencana kerja dan membuat laporan kegiatan penyuluhan perikanan

Timja Penyuluhan (dengan jumlah anggota 605 orang) dengan uraian tugas dibawah ini :

- Pendampingan kelompok,
- Penilaian kelas kelompok,
- Pendampingan akses modal,
- Pendampingan akses pasar,
- Pendampingan akses informasi/teknologi,
- Pembinaan UMKM dan Koperasi,
- Pendampingan kelompok penerima bantuan
- Meningkatkan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai KepMen KP No.

14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

- Membentuk kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
- Pendataan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan
- Penerapan metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti di lingkungan BRSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BRSDM. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja pada BRPBAPPP. Sesuai dengan Surat Tugas Kepala BRPBAPPP nomor B.4512/BPPSD,- BRPBAPPP/KP.440/IX/2023 Tanggal 11 September 2023 menyebutkan bahwa memberi tugas kepada seluruh pegawai BRPBAPPP untuk 1) menjadi Ketua dan/atau Anggota sesuai susunan keanggotaan Tim Kerja; 2) memastikan pencapaian Indikator Kinerja dan pelaksanaan Uraian Fungsi dengan penuh tanggung jawab; dan 3) menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Kepala BRPBAPPP. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja BRPBAPPP Nomor DIPA-032.12.2.403828/2022, tanggal 17 November 2022.

Susunan Keanggotaan Tim Kerja BRPBAPPP terdiri dari 2 (dua) tim kerja antara lain: 1. Tim Kerja Manajerial dan 2. Tim Kerja Penyuluhan. Masing-masing tim kerja memiliki ketua dan anggota dalam melaksanakan fungsinya.

Tim Kerja Manajerial memiliki fungsi sebagai koordinasi dan melaksanakan kegiatan manajerial. Dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 11 Indikator Kinerja Manajerial dan didukung juga dengan SDM yang terdiri dari 41 ASN, 1 orang P3K 39 PPNPN, 1 P3K, 37 orang Outsourcing. Sedangkan pada Tim Kerja Penyuluhan memiliki fungsi sebagai koordinasi dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan dalam menjalankan fungsi tersebut juga mendukung 7 Indikator Kinerja Utama dan SDM terdiri dari 598 orang penyuluh

Tabel 2. Pembagian Tugas Tim Kerja Lingkup BRPBAPPP

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	A. Penyuluhan Terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan	1. Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di satminkal BRPBAPPP (kelompok)	• Pendampingan kelompok, • Penilaian kelas kelompok, • Pendampingan akses modal, • Pendampingan akses pasar, • Pendampingan akses informasi/teknologi, • Pembinaan UMKM dan Koperasi, • Pendampingan kelompok penerima bantuan
		2. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BRPBAPPP (kelompok)	Meningkatkan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai KepMen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
		3. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di satminkal BRPBAPPP (kelompok)	Membentuk kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan, dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
		4. Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPBAPPP (orang)	Pendataan tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
		5. Kelompok masyarakat yang mendapatkan percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan di satminkal BRPBAPPP (kelompok)	Penerapan metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna
2.	B. Dukungan Manajerial Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1. Nilai PNPB BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	Pelaksanaan pemanfaatan aset dalam rangka pemenuhan target PNPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		2. Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPBAPPP dibandingkan realisasi anggaran BRPBAPPP TA 2023 (%)	Menjamin kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK
		3. Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Meningkatkan Profesionalitas ASN
		4. Nilai PM SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Penyelenggaraan SAKIP berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
		5. Nilai rekonsiliasi kinerja BRPBAPPP (Nilai)	Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di satuan kerja BRPBAPPP serta menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon III untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik
		6. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BRPBAPPP (%)	Memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari
		7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan BRPBAPPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
		8. Nilai IKPA BRPBAPPP (Nilai)	Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sesuai

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			dengan standar yang telah ditetapkan
		9. Nilai kinerja anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Mengukur dan mengevaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA
		10. Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti lingkup BRPBAPPP (Kemitraan)	Menjalin kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPBAPPP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama.
		11. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPBAPPP (%)	Melaksanakan kegiatan BRPBAPPP yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPBAPPP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
		12. Persentase layanan dukungan manajemen internal di satminkal BRPBAPPP (%)	Mendukung administrasi penyelenggaraan penyuluhan perikanan, menyusun rencana kerja dan membuat laporan kegiatan penyuluhan perikanan

Sumber : Surat Tugas Kepala BRPBAPPP nomor B.4512/BPPSD,-BRPBAPPP/KP.440/IX/2023

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan. Setiap unsur di lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Setiap pimpinan pada unit organisasi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

D. KERAGAMAN SDM BRPBAPPP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bidang riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP 75/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BRPBAPPP. BRPBAPPP mengemban tugas sebagai balai riset perikanan budidaya air payau dan sebagai balai penyuluhan perikanan yang memiliki wewenang sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) penyuluhan perikanan yang terdiri dari 47 kabupaten/kota di 3 Provinsi, yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

Dalam rangka mengakselerasi tugas BRPBAPPP tersebut, masing-masing pegawai/pejabat harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal diantaranya diklat, seminar, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Administrasi dan pengelolaan kepegawaian juga juga dituntut melakukan tugas pokok dan fungsinya secara cermat, untuk mendukung administrasi dan karier kinerja PNS berdasarkan sistem merit. Dalam sistem merit ini, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: tanggal/bulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan gaji berkala, program pengembangan pegawai melalui tugas belajar, ijin belajar, pelatihan jabatan, pelatihan dan pendidikan keterampilan.

Sumber Daya Manusia dengan jabatan Riset Perikanan seperti Peneliti, Perekayasa dan teknisi Laboratorium telah dialihkan tugas ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Proses integrasian ke BRIN telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Telah terbit pula Keputusan Presiden tentang penetapan jabatan peneliti/perekayasa ahli utama dan Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang penetapan jabatan peneliti ahli madya, muda, dan pertama di lingkungan BRIN. Selain itu, Jumlah SDM dalam jabatan fungsional tertentu mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dikarenakan dalam periode akhir TA. 2023 ada kebijakan nasional penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional tertentu (transformasi).

Selain itu ada juga pegawai fungsional umum yang berpindah jabatan ke JF tertentu sehingga komposisi dan jumlah jabatan fungsional tertentu di lingkup BRPBAPPP

Kinerja suatu unit kerja dapat dicapai dengan optimal apabila masing-masing pegawai/pejabat melaksanakan tugas secara maksimal. Masing-masing jabatan memerlukan kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, maka perlu upaya peningkatan SDM melalui pendidikan non formal diantaranya diklat, bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan. Dukungan sumber daya manusia pada program/kegiatan riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan mutlak sangat diperlukan. Pegawai BRPBAPPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan dari tingkat dasar (SD). sampai dengan pasca sarjana (S3) yang ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Perbenihan Budidaya Udang Windu di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Jumlah pegawai Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros pada tahun 2025 sebanyak 673 orang yang terdiri dari 418 orang PNS, 75 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 180 orang Non ASN. Masing-masing pegawai tersebut ditempatkan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Instalasi Riset Maranak, Instalasi Riset Perbenihan Budidaya Udang Windu Di Barru dan Instalasi Tambak Percobaan di Punaga Takalar Sedangkan para penyuluh perikanan tersebar di 3 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja

No	Instansi	PNS	CPNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1.	Kantor BRPBAPPP Maros	30	-	1	26	57
2.	Instalasi Pembenihan Barru	3	-	-	19	22
3.	Instalasi Tambak Takalar	-	-	-	6	6
4.	Instalasi Silvofishery Marana	2	-	-	3	5
5.	Penyuluh Perikanan	384	-	74	126	584
Total		419	0	75	180	674

Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Tahun 2025

Tabel 4. Jumlah ASN BRPBAPPP 2025

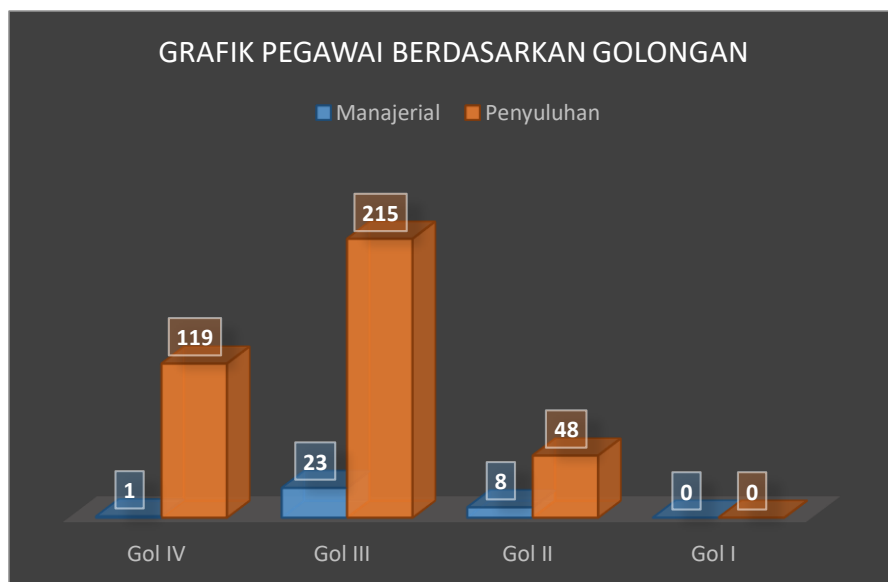
No	Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BRPBAPPP	674	673	674									

Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025

Kapasitas sumberdaya manusia dalam menunjang kegiatan BRPBAPPP merupakan faktor yang sangat vital untuk menghasilkan output yang berkualitas dan dapat diserap oleh *stakeholder*. Adapun total ASN (PNS dan PPPK) yang dimiliki oleh BRPBAPPP sampai dengan Maret 2025 berjumlah 673 orang, yang terdiri dari 418 orang PNS, 75 orang PPPK dan 180 orang Non PNS. sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV sebanyak 125 orang (1 orang manajerial dan 119 orang penyuluh), Golongan III sebanyak 238 orang (23 orang riset dan 215 orang penyuluh), Golongan II sebanyak 56 orang (8 orang riset dan 48 orang penyuluh), dan Golongan I tidak ada.

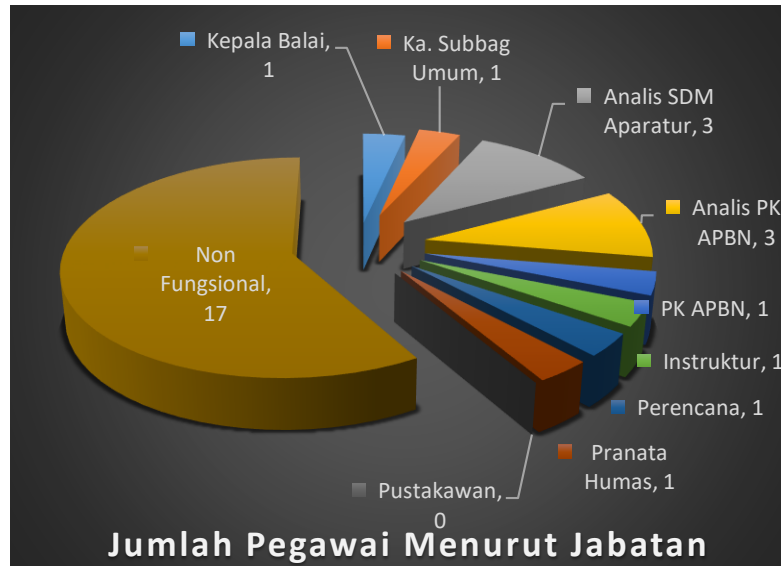


Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025

Grafik 1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

b. Menurut Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai menurut jabatan: Kepala Balai 1 orang, Kepala Subbagian Umum 1 orang, Pelaksana (JFU) 22 orang, Analis SDM Aparatur 3 orang, Analis PK APBN 3 orang, PK APBN 1 orang, Instruktur 1 orang, Perencana 1 orang, Pranata Humas 1 orang, Penyuluh Perikanan 463 orang, Pustakawan 0 orang dan Non Fungsional 17 orang.

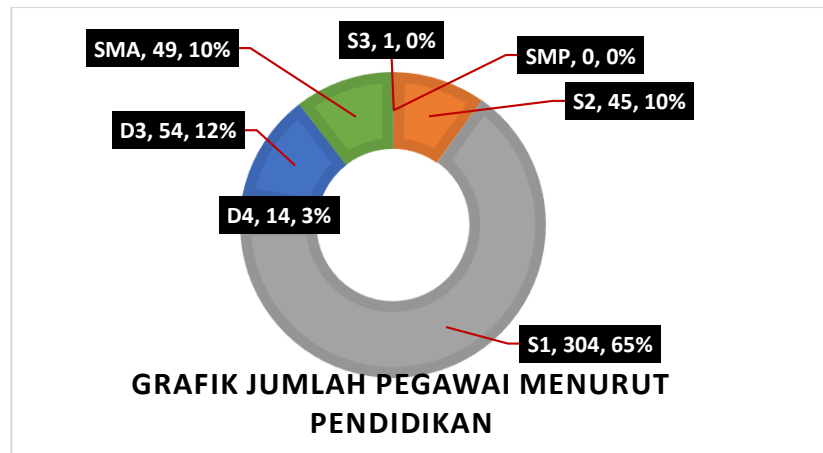


Sumber: data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025

Grafik 2. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

c. Menurut Pendidikan

Rincian jumlah pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut: S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 45 orang, S1 sebanyak 304 orang, D4 sebanyak 14 orang, D3 sebanyak 54 orang, SMA sebanyak 49 orang, dan SMP sebanyak 0 orang.

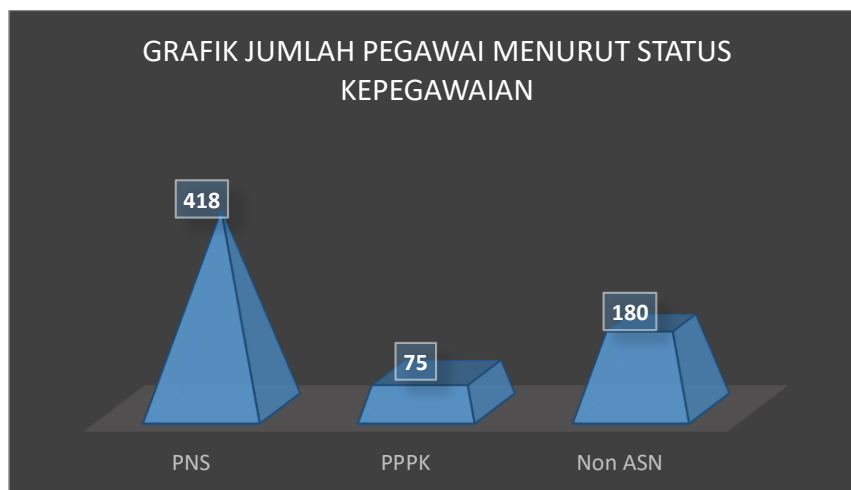


Sumber: data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025

Grafik 3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

d. Menurut Status Kepegawaian

Jumlah pegawai menurut status kepegawaian sebanyak 673 orang yang terdiri dari: PNS sebanyak 418 orang yang terdiri dari 75 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 180 orang Non ASN Pegawai BRPBAPPP ditempatkan di Kantor BRPBAPPP Maros, Instalasi Pembenihan Barru, Instalasi Tambak Takalar, dan Instalasi Silvofishery Marana. Sedangkan untuk Penyuluh Perikanan tersebar di 3 provinsi yaitu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara

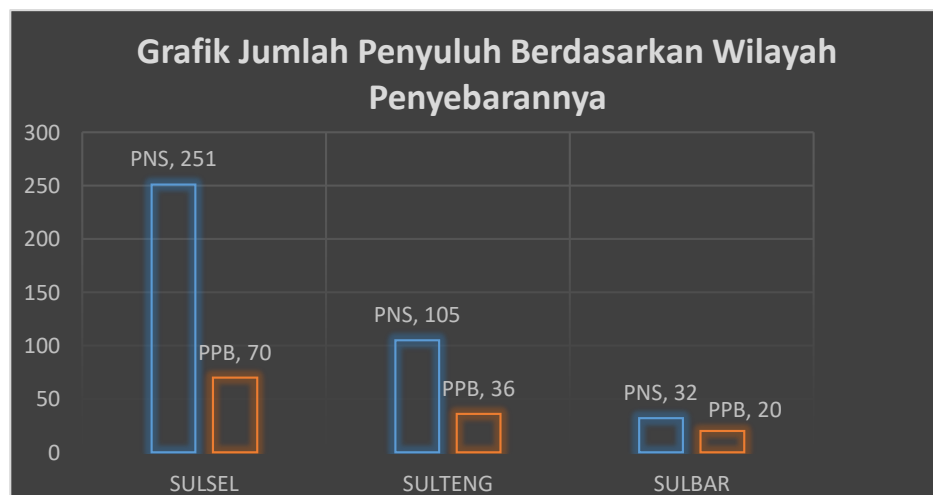


Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I tahun 2025

Grafik 3. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

e. Persebaran Penyuluh

Jumlah Penyuluh Perikanan ASN secara keseluruhan ada 385 orang, dengan rincian Penyuluh Perikanan ASN di setiap wilayah penyebarannya adalah sebagai berikut: Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 251 orang, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 105 orang, Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 32 orang serta Jumlah Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) sebanyak 90 orang terdiri dari wilayah Sulawesi Selatan sebanyak 70 orang, wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 36 orang dan Sulawesi Barat sebanyak 20 orang.



Sumber : data keragaan pegawai BRPBAPPP Triwulan I tahun 2025

Grafik 5. Grafik Jumlah Penyuluh Berdasarkan Wilayah Penyebarannya

f. Aset/ Sarana Prasarana

Potensi dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan meliputi sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, serta anggaran yang mendukung kegiatan. Sumberdaya manusia yang mendukung BRPBAPPP terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, serta pejabat fungsional umum yang mendukung pelaksanaan kegiatan BRPBAPPP sebagaimana yang disebutkan pada keragaan SDM sebelumnya.

Prasarana dan sarana pendukung untuk kegiatan BRPBAPPP antara lain adalah tanah, bangunan kantor, hatchery dan kolam percobaan untuk menghasilkan teknologi budidaya air payau yang aplikatif dan efisien, ruang pertemuan, perpustakaan, dan laboratorium terakreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2005). Beberapa laboratorium yang dimiliki oleh BRPBAPPP antara lain adalah : (1) Lab Reproduksi dan Genetika Ikan, (2) Lab Nutrisi dan Teknologi Pakan, (3) Lab Lingkungan dan Toksikologi, dan (4) Lab Kesehatan Ikan. Beberapa aset yang dimiliki oleh BRPBAPPP s/d akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Sumber : Data BMN Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Output	Satuan	Target	Capaian
1	Optimalisasi aset			
a.	Instalasi Minapadi Maros (luas total : 24 Ha)	%	100	100
b.	Instalasi Tambak Marana (46 Ha)	%	100	100
c.	Instalasi Tambak Takalar (luas total 12 Ha)	%	50	50
d.	Instalasi Pembenihan Barru (luas total: 9 Ha)	%	100	100

Sumber Data BMN BRPBAPPP Tahun 2024

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset, pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

BRPBAPPP, selain melaksanakan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan ditetapkan sebagai satuan administrasi pangkalan (satminkal) untuk penyuluhan kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan di ketiga provinsi tersebut didukung oleh 382 penyuluh perikanan.

Kegiatan di BRPBAPPP didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang sebagian besar ruang lingkupnya sudah mendapat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Laboratorium Penguji karena telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2008 (ISO/IEC 17025:2005). BRPBAPPP memiliki 5 laboratorium penguji dengan 25 ruang lingkup. Namun pada tahun 2022 telah dilakukan pengalihan tugas dan fungsi riset dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan Peraturan No 33 Tahun 2021 tentang “Badan Riset di bidang Perikanan Air Payau”. Lingkungan strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh BRPBAPPP meliputi faktor-faktor strategis yang berhubungan dengan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) BRPBAPPP, sedangkan faktor-faktor strategis eksternal berhubungan dengan peluang (opportunity) dan ancaman (threats) BRPBAPPP. Selanjutnya dilakukan analisis SWOT yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan dari BRPBAPPP kedepannya.

Beberapa arah kebijakan BRPBAPPP yang terkait kegiatan penyuluhan yang selaras dengan kebijakan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP serta mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain adalah:

1. Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Berbasis Komoditas Unggulan Kelautan dan Perikanan.
2. Penataan Kebijakan Penyuluhan KP, melalui penyelesaian legislasi: Kebijakan dan Strategi Penyuluhan KP, Mekanisme 42 Penyelenggaraan Penyuluhan KP, Kelembagaan, Sarpras, Metoda dan Materi, dan Pola Diklat Penyuluh.
3. Penguatan kelembagaan penyuluhan KP, meliputi sinergitas dan koordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat regional dan pemerintah daerah, serta penguatan kelompok pelaku utama perikanan.
4. Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan melalui Pengembangan materi penyuluhan bentuk cetak, CD video, web; Penyuluhan dengan media cetak,

tertayang dan terdengar, Pemanfaatan sms gateway, web (cyber extension); dan Temu: aplikasi, percontohan, dan lain-lain.

Anggaran untuk kegiatan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini berasal dari Pusat Penyuluhan KP. Penganggaran BRPBAPPP sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework), dan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Anggaran untuk kegiatan riset perikanan dan penyuluhan perikanan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran BRPBAPPP pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Anggaran BRPBAPPP Triwulan I TA. 2025

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	81.233.143.000
2	Belanja Barang	15.863.794.000
3	Belanja Modal	0
Total Anggaran		97.196.937.000

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/DataRealisasi>

Pada tahun 2025 pagu anggaran BRPBAPPP adalah sebesar Rp.97.096.937.000,-Untuk melaksanakan fungsinya dalam melakukan penyuluhan, BRPBAPPP memiliki penyuluh perikanan yang telah melakukan tugas pada periode 2025–2025 diantaranya sebagai berikut:

- ✚ Pendampingan Kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR) dalam akses teknologi, informasi dan permodalan usaha KP;
- ✚ Penumbuhan dan peningkatan kelas kemampuan kelompok (KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR dan KUGAR);
- ✚ Pendampingan bantuan pemerintah (asuransi nelayan/pembudidaya ikan, sertifikat tanah nelayan, sarana alat tangkap ikan, minapadi, bioflok, integrasi lahan garam rakyat, ice flake, dll.);
- ✚ Pendirian Koperasi (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);

- ✚ Legalisasi Izin Usaha Mikro dan Kecil/IUMK sektor KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar dan petambak garam);
- ✚ Sosialisasi peraturan per-UU perikanan;

b) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyuluhan Perikanan untuk mendukung pembangunan KP yakni :

1. Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan.
2. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi penggabungan pegawai sehingga seluruh peneliti diintegrasikan ke BRIN sehingga BRPBAPPP yang merupakan satker dibawah BPPSDM akan mengalami transformasi kelembagaan serta tugas dan fungsi.
3. Telah dikeluarkannya Perka.badan No 63/tahun 2022 dan Keputusan Kepala Balai No. 184 Tahun 2025 mengenai tentang “Penetapan Penyuluh Perikanan ASN Tahun 2025” dan Perka badan No 9 Tahun 2025 tentang Penyuluh Perikanan Bantu, masih banyak penyuluh yang belum mengerti sehingga perlu sering melakukan Sosialisasi dan berkoordinasi lebih lanjut.
4. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota yang memiliki potensi perikanan;
5. Sistem monitoring terhadap penyuluhan perikanan masih belum memadai karena cakupan wilayaha terlalu luas dengan anggaran monitoring yang masih kurang memadai.

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif , pada bab ini berisi ringkasan dari laporan ini antara lain berisi uraian singkat tentang sasaran capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I Tahun 2025

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPBAPPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai di BRPBAPPP.
3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPBAPPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025 serta Pengukuran Kinerja.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
6. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dari hal lain yang dianggap penting.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Peran strategis BRPBAPPP meliputi: 1) merencanakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif; 2) menyelenggarakan riset dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset kelautan dan perikanan; 6) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; dan 7) meningkatkan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HaKI) melalui hasil riset.

Pusat Penyuluhan KP memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP dengan: 1) meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi; 2) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan; 3) membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan

perikanan; dan 4) meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Tabel 6. Indikator Kinerja/Output dan capaiannya untuk tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP	5005	5005	5005	5005	5005
2	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP	168	168	168	168	168
3	Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP	510	510	510	510	510
4	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP	1.6238	1.6305	1.7120	1.7243	1.8106
5	Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP	43	43	43	43	43
6	Media Penyuluhan Sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di satker BRPBAPPP	1	1	1	1	1
7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	3	3	3	3	3
8	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP	18	18	20	20	20
9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP	12	12	15	15	15
10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP	1	1	1	1	1
11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP	85	85	85	85	85
12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP	92	92	92	92	92
13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP	81	81	81	81	81

No	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP	71.5	71.5	71.5	71.5	71.5
15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP	81	82	82	83	83
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP	80	85	85	85	85
17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBAPPP	80	80	80	80	80

Sumber: Matriks RKT RPBAPPP Tahun 2025-2029

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, seluruh peneliti dilingkungan BPPSDM melakukan penyesuaian dengan melakukan perpindahan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga akan terjadi transformasi kelembagaan Pusat dan UPT lingkup BPPSDM dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 6“ Badan Riset Sumberdaya Manusia (BPPSDM) menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM). Sampai Triwulan I Tahun 2025, KKP masih menyiapkan Peraturan Menteri sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tersebut, sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPPSDM untuk level Eselon 2 dan Unit Pelaksana Teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 48/PERMEN-KP/2020. Namun demikian telah dilakukan penyesuaian dan review Renstra BPPSDM yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja BPPSDM.

B. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan RPJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi BRPBAPPP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

C. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. “Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- b. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas

Implementasi dari visi dan misi Presiden Republik Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

D. TUJUAN

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BPPSDM KP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan KP
- b. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan produktivitas tenaga kerja bidang Penyuluhan KP;
- c. Meningkatnya pemanfaatan inovasi teknologi mendukung idustrialiasi KP yang berdaya saing; dan
- d. Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BPPSDM guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

E. SASARAN

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut :

SP-1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator : Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya.

SP-2 : Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator :

1. Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan.

Dalam rangka menindaklanjuti Menindaklanjuti Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.410/BPPSDM.1/RC.610/I/2025, tanggal 20 Januari 2025 perihal Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025, maka perjanjian kinerja triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5.005
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	168
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	510
		4	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	1,6238
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	43
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	1
		7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	3
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	18
		9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	12
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan	10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	1
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	81
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,5
		15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	81
		16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	80
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	80

Sumber: PK Januari 2025

F. RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Rencana kinerja tahunan pada dasarnya adalah dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana tekad dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ditelitinya sesuai dengan rencana kinerja Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPBAPPP Tahun 2025 meliputi 2 (dua) program yaitu : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Program Dukungan Manajemen dengan rincian pagu kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.854.151.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.883.143.000,- .

Pada tanggal 2 Januari 2025 Pagu awal anggaran sebesar Rp. 97.737.294.000,- Pada tanggal 25 Februari 2025 terjadi Revisi anggaran disebabkan adanya Efisiensi Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.737.294.000,- Untuk realisasi per tanggal 31 Maret 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp 24.445.474.015,- (98,06%),- yang berasal dari total pagunya sebesar Rp. 97.096.937.000,- Belanja pegawai realisasi sebesar Rp 21.801.845.412,- (26,84%),- dengan pagu sebesar Rp.

81.233.143.000,- Belanja barang realisasi sebesar Rp 2.643.628.603,- (16,66%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.863.794.000,-

Tabel 8. Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp.000)	Anggaran Revisi (Rp.000)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	14.370.060	14.370.060
2	Program Dukungan Manajemen	96.700.964	99.515.964

Sumber : RKAKL 2025

Rencana kinerja tahunan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan tahun 2024 terdiri dari sasaran, indikator dan target tahun 2025 yang didasarkan pada dokumen SMART. Target ditetapkan untuk indikator kinerja utama sebagai output kinerja tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 9. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Riset Pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5.005
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	168
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	510
		4	Nilai PNPB Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	1,6238
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	43
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	1
		7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang	3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan		diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	18
		9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	12
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	1
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	85
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	81
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,5
		15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	81
		16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	80
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	80

Sumber : RKT 2025

G. PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi Pemerintah wajib menyusun perjanjian kinerja berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan 5) sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perjanjian kinerja tahun 2024 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja, yang dijabarkan sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA BRPBAPPP DENGAN PUSAT PENYULUHAN

MenindaklanjutiMenindaklanjuti Surat Sekretaris BPPSDM Nomor B.410/BPPSDM.1/RC.610/I/2025, tanggal 20 Januari 2025 perihal Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025, maka perjanjian kinerja triwulan I tahun 2025, BRPBAPPP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala BRPBAPPP dengan Kepala Pusat Penyuluhan Perikanan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (*strategy map*) dengan 4 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2025 untuk semua SS berjumlah 4 yang terdiri dari 17 IK. Adapun perincian Perjanjian Kinerja BRPBAPPP dengan Pusat Penyuluhan pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Pusat Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 (Per Januari 2025)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5.005
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	168
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	510
		4	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	1,6238
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	43
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	1
		7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	3
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	18
		9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	12
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan	10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	85
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	81
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,5
		15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	81
		16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	80
		17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	80

Sumber : Perjanjian Kinerja Januari 2025

Tabel 11. Data Anggaran TA. 2024 Lingkup BRPBAPPP

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5.854.151.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	91.883.143.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan		97.737.294.000

Sumber : Perjanjian Kinerja Januari 2025

Pada Perjanjian Kinerja triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat bahwa terdapat 4 Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada BRPBAPPP dengan 17 Indikator Kinerja (IK). Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari Program Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan BRPBAPPP pada triwulan I Tahun 2025, maka dijabarkan ke dalam 2 kegiatan yang dibagi beberapa output kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

1.1. Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

 Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan.

- a. Penyuluhan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi



Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat terdiri dari:

- a. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluhan KP kepada Kelompok Masyarakat KP
- b. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi.

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari: Layanan BMN, Layanan Humas, Layanan Umum, Layanan Perkantoran;
- b. Layanan Manajemen SDM Internal terdiri dari: Layanan Manajemen SDM;
- c. Layanan Manajemen Kinerja Internal terdiri dari: Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum pada Tabel di atas, selanjutnya dituangkan ke dalam rencana aksi/ inisiatif strategis. Rencana Aksi atau Inisiatif Strategis adalah kegiatan yang tertuang di Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) yang merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama. Masing-masing kegiatan yang terdapat di RKA-KL terkait dengan anggaran tahun berjalan. Penanggung jawab kegiatan di RKA-KL terkait juga dengan penanggung jawab indikator kinerja utama yang di cascading oleh Kepala BRPBAPPP ke Tim Pokja.

Rencana aksi BRPBAPPP disusun pada awal tahun atau setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja. Rencana aksi berisi target output/volume dan progress fisik masing-masing kegiatan yang menjadi pendukung sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama BRPBAPPP selama triwulan I tahun 2025.

G. PENGUKURAN KINERJA

1. Rumusan Pengukuran

Nilai kinerja adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK. Status capaian yang ditunjukkan dengan pewarnaan ditentukan dari perbandingan antar capaian dengan target. Untuk menghitung nilai kinerja perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK dengan sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas

tingkat validitas IKK, terdiri dari Outcome, Output Kendali Rendah, Output Kendali Tinggi, dengan bobot seperti tabel berikut:

Tabel 12. Bobot validasi IKK

No	Validaditas IKU	Bobot
1	Outcome	5
2	Output Kendali Rendah	3
3	Output Kendali Tinggi	2

Sumber : Aplikasi Kinerja Triwulan I TA.2025

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek menengah atau panjang.
2. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator.
3. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator.

Rumus Pengukuran Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capain IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Sumber : Perjanjian Kinerja Januari Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *SMART*.

2. Metode Pengukuran Kinerja

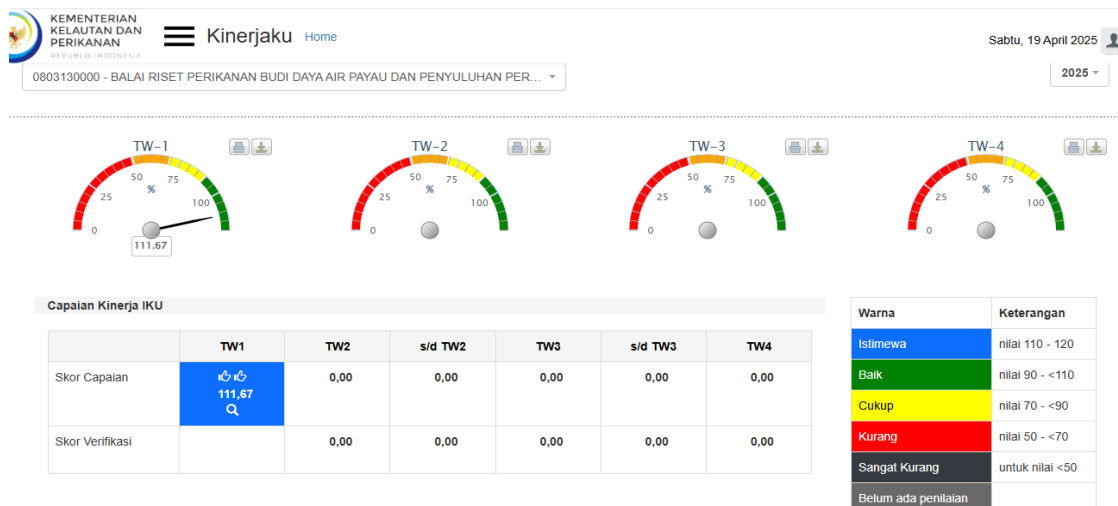
Metode pengukuran kinerja lingkup BRPBAPPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran telah ditugaskan kepada Pelaksana anggota Pokja Monev BRPBAPPP untuk menyusun laporan LKj Triwulan dan LKj Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulan III tahun 2024 dipantau oleh anggota Pokja Monev dibawah tanggung jawab kegiatan Tata Operasional Selanjutnya Pelaksana Pokja Monev melaporkan kepada Tim Pokja Pusriskan, Tim Pokja Puslatluh dan Tim Pokja BPPSDM KP KP yang kemudian akan merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan pada lingkup BRPBAPPP.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN I TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP triwulan I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target tahunan, target triwulan tahun berjalan dan target triwulan tahun lalu dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDM di tingkat korporat triwulan I tahun 2025 sebesar 111,67%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Sumber: SAPK KKP, Triwulan I Tahun 2025

Gambar 3. Capaian Kinerja IKU Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id.

Daftar Capaian Unit Kerja					Download		Tutup	
Tahun	Level-1	Level-2	Level-3					
2025	Belum di pilih...	Belum di pilih	Belum di pilih					
TW-1			TW-2			TW-3		TW-4
0803130000 - BALAI RISET PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN								
111.67% 📊👁️🔄			+👁️🔄			+👁️🔄		+👁️🔄

Sumber: SAPK KKP Triwulan I Tahun 2025

Gambar 4. Daftar Capaian BRPBAPPP Tahun 2024 Berdasarkan Dashboard Kinerja BRPBAPPP pada www.kinerjaku.kkp.go.id.

Tabel 13. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satu an	Polari sasi	Perhitu ngan	Targ et 2025	Tar get MA RET	Cap aian MAR ET	%	Tar get s/d MA RET	Cap aian s/d MAR ET	%
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						113,33			113,33	
IKSK.0 1.01	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelo mpok	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	5,00 5,00	150,00	180,00	120,00	150,00	180,00	120,00
IKSK.0 1.02	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelo mpok	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	168,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
IKSK.0 1.03	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelo mpok	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	510,00	6,00	10,00	120,00	6,00	10,00	120,00
IKSK.0 1.04	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	Rupia h Milyar	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	1,62	0,15	0,20	120,00	0,15	0,20	120,00
IKSK.0 1.05	Gabungan Kelompok/Kopera si/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	Unit	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	43,00	2,00	3,00	120,00	2,00	3,00	120,00
S.02	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK.0 2.01	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	Paket	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 2.02	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	Kelo mpok	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satu an	Polari sasi	Perhitu ngan	Targ et 2025	Tar get MA RET	Cap aian MAR ET	%	Tar get s/d MA RET	Cap aian s/d MAR ET	%
	BRPBAPPP (Kelompok)										
S.03	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK.0 3.01	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Oran g	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	18,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0
IKSK.0 3.02	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	Oran g	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	12,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0
S.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00	
IKSK.0 4.01	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	Doku men	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0
IKSK.0 4.02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	85,0 0	85,0 0	85,0 0	100 ,00	85,0 0	85,0 0	100 ,00
IKSK.0 4.03	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	92,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0
IKSK.0 4.04	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	81,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0
IKSK.0 4.05	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	71,5 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0
IKSK.0 4.06	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indek s	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	81,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0
IKSK.0 4.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	80,0 0	80,0 0	100,00	120 ,00	80,0 0	100,00	120 ,00
IKSK.0 4.08	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	%	Maxim ize	Nilai Posisi Akhir	80,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,0 0

Sumber: SAPK KKP Triwulan I Tahun 2025

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada triwulan I tahun 2025. Ketiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBAPPP pada tahun 2024 adalah sebesar 111,67%, hanya satu IK yang mencapai target tahunan yakni : IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%), capaian triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dengan target tahunan dan target triwulan I tahun 2025 sebesar 80%, sedangkan capaian IK lainnya tercapai dari target triwulan I tahun 2025 dan IK yang lainnya pengukurannya dilakukan pada akhir tahun 2025. Adapun Rincian capaian indikator kinerja yang terdapat target pada triwulan I tahun 2025 pada masing-masing sasaran strategis, sesuai dengan nilai NKO sebesar 111,67% yakni :

1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 5 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - 1) Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 5005 kelompok, capaian triwulan I sebesar 150 Kelompok dari target triwulan I sebesar 180 Kelompok (120%), berstatus biru.
 - 2) Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 168 kelompok, capaian triwulan I sebesar 150 Kelompok dari target triwulan I sebesar 180 Kelompok (120%), berstatus biru.
 - 3) Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Miliar) target tahunan sebesar 1,6238 kelompok, capaian triwulan I sebesar 0,20 Rupiah Miliar dari target pertriwulan sebesar 0,15 Rupiah Miliar (120%), berstatus berwarna biru.
 - 4) Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit) target tahunan sebesar 43 Unit, capaian triwulan I sebesar 2 Unit dari target triwulan I sebesar 3 Unit (120%), berstatus biru.
2. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 2 Indikator Pendukung yaitu :

- 3) Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)) target tahunan sebesar 1 Paket dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
- 4) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 1 Paket dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
3. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 2 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - 1) Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang) target tahunan sebesar 18 Orang dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
 - 2) Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang) target tahunan sebesar 12 Orang dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, memiliki 8 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - 1) Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen), target tahunan sebesar 1 Dokumen dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025
 - 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%), target tahunan sebesar 85% dan capaian triwulan I sebesar 85% dari target triwulan I sebesar 85% (100%), berstatus hijau.
 - 3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 92 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan persemester tahun 2025.
 - 4) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 81 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
 - 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 71,50 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

- 6) Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks), target tahunan sebesar 81 Indeks dan belum ada capaian karena pengukurannya dilakukan persemester tahun 2025.
- 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%), target tahunan sebesar 80% dan capaian triwulan I sebesar 100% dari target triwulan I sebesar 80% (120%), berstatus biru.
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%) target tahunan sebesar 80% dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Capaian kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sampai dengan triwulan I tahun 2025 merupakan kontribusi dari Tim Pokja lingkup Penyuluh dan Tim Pokja Lingkup Manajerial.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPBAPPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPBAPPP yang menjadi kontrak kinerja pada triwulan I tahun 2025 dapat tercapai.

C. CAPAIAN KINERJA BRPBAPPP

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang

dituangkan pada penetapan kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros pada tahun triwulan I tahun 2025 dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros selama tahun 2024 hanya tersedia internal process mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *SMART*. Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja utama triwulan I tahun 2025 yang mengacu *SMART* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. Capaian IKU Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarsasi	Perhitungan	Target 2025	Target MA RET	Capaian MAR ET	%	Target s/d MA RET	Capaian s/d MAR ET	%
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						113,33			113,33	
IKSK.0 1.01	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5.00 5,00	150,00	180,00	120,00	150,00	180,00	120,00
IKSK.0 1.02	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	168,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
IKSK.0 1.03	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	510,00	6,00	10,00	120,00	6,00	10,00	120,00
IKSK.0 1.04	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	Rupiah Milyar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,62	0,15	0,20	120,00	0,15	0,20	120,00
IKSK.0 1.05	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	43,00	2,00	3,00	120,00	2,00	3,00	120,00
S.02	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK.0 2.01	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 2.02	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target MA RET	Capaian MAR ET	%	Target s/d MA RET	Capaian s/d MAR ET	%
	BRPBAPPP (Kelompok)										
S.03	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK.0 3.01	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 3.02	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	12,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00	
IKSK.0 4.01	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 4.02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00
IKSK.0 4.03	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 4.04	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 4.05	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 4.06	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.0 4.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
IKSK.0 4.08	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: SAPK KKP Triwulan I Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategis yang dituangkan pada penetapan kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros triwulan I tahun 2025 dapat tercapai. Capaian Kinerja yang tersedia pada aplikasi kinerjaku hanya pada “Internal process perspective”.

SASARAN KEGIATAN 1.

TERSELENGGARANYA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan pertama pada triwulan I tahun 2025 yakni Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung 5 indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut.

INDIKATOR KINERJA 1

KELOMPOK PELAKU UTAMA/PELAKU PENDUKUNG YANG DISULUH OLEH BRPBAPPP (KELOMPOK)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang disuluh dan dibentuk pada tahun sebelumnya oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pendampingan akses modal, pendampingan akses perizinan berusaha dan pendampingan manajemen usaha kelompok. Pelaksanaan pendampingan sesuai penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari bentuk pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Setiap kelompok memiliki kode Registrasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPPSDMKP/ Surat Kepala Pusat Penyuluhan KP tentang Pedoman Administrasi dan Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

CONTOH Kode Registrasi Kelompok : 2.1.12.05.0109.0214

2 : kelompok kelas lanjut (Menjelaskan Kelas Kelompok)

1 : POKDAKAN (Menjelaskan Jenis Usaha Kelompok)

12 : Provinsi Jawa Barat (Provinsi)

5 : Kabupaten Karawang (d disesuaikan dengan kodefikasi pada masing-masing wilayah)

0109 : bulan dan tahun terbentuk

214 : bulan dan tahun dikukuhkan

Formula perhitungan Jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang telah disuluh dan disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil yang disahkan oleh Koordinator Penyuluh Perikanan dan Kepala UPT Penyuluhan KP.

Tabel 15. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
3,364	4,280	2,619	1,913	5,005.00	150.00	180.00	120.00	-90.59	0	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa target triwulan I tahun 2024 sebanyak 3000 kelompok, capaian triwulan I tahun 2024 sebanyak 3364 kelompok (112,13%), sedangkan capaian triwulan I tahun 2025 sebanyak 180 kelompok (120%) dari target triwulan I sebesar 150 kelompok sehingga mengalami penurunan sebanyak 80,59%.

Apabila melihat capaian pada tahun 2021-2024 diatas, capaian indikator tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaiannya adalah sebesar 3364 kelompok dari target 3000 kelompok (112,13%). Pada tahun 2022 capaiannya adalah sejumlah 4280 kelompok dari target 4000 kelompok (107%). Pada tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 2619 kelompok dari target 1000 kelompok (120%), dan pada tahun 2024 capaiannya adalah sejumlah 1913 kelompok dari target 1500 kelompok (120%). Sedangkan target pada renstra di triwulan I tahun 2025 belum ada karena renstra belum terima dari Eselon II

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh yang menjadi binaan penyuluh perikanan memiliki usaha sebagai nelayan, pembudidaya, pengolahan dan pemasaran serta usaha garam rakyat. Untuk memudahkan melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan, kelompok-kelompok

binaan penyuluh dibagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan bidang usahanya seperti :

1. KUB (Kelompok Usaha Bersama),
2. POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan),
3. POKLAHSAR (Kelompok Pengolahan Dan Pemasaran),
4. KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat) dan
5. POSMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas).

Tujuan utama pembagian ini untuk memudahkan penyuluh untuk menyampaikan materi penyuluh kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha KP yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan Satminkal BRPBAPPP Maros Tahun 2024 Dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Berdasarkan bidang Usaha KP

Tabel 16. Realisasi capaian berdasarkan Klasifikasi kelas dan bidang usaha yang disuluh Triwulan I Tahun 2025

NO	BIDANG USAHA	PROVINSI			TOTAL
		Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Sulawesi Tenggara	
1	Budidaya (POKDAKAN)	74	7	19	100
2	Garam (KUGAR)	0	0	0	0
3	Penangkapan (KUB)	41	8	13	62
4	Pengolahan/Pemasaran (POKLAHSAR)	12	1	5	18
5	POSMASWAS	0	0	0	0
	TOTAL	127	16	37	180

Sumber : Katimja Penyuluhan

Jumlah Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) Maros Tahun 2025 adalah 180 Kelompok KP. Bidang Usaha yang terbanyak dimiliki Kelompok KP di Satminkal BRPBAPPP Maros tahun 2025 adalah budidaya/POKDAKAN, yaitu 100 kelompok, diikuti oleh bidang Penangkapan (KUB) 62 Kelompok, Pengolahan/Pemasaran 18 Kelompok, Garam/KUGAR 0 kelompok dan POKMASWAS 0 kelompok.

Hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh yang menjadi binaan penyuluh perikanan mayoritas memiliki usaha sebagai

pembudidaya, baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat maupun Sulawesi Tenggara. Potensi terbesar kelompok KP yang dimiliki oleh Satminkal BRPBAPPP Maros adalah bidang budidaya. Sedangkan yang masih perlu ditingkatkan lagi potensinya adalah bidang Garam dan Pokmaswas karena masih dikembangkan di daerah Sulawesi Barat, belum mencakup daerah Sulawesi Tenggara.

Penyuluhan atau Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan Kegiatan Penyuluhan Perikanan diharapkan mampu menjadi salah satu katalisator dalam upaya mengerakkan sumberdaya manusia yang handal dan profesional sebagai modal dasar bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Tabel 17. Realisasi Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025

NO	PROVINSI	JUMLAH KELOMPOK	KELAS KELOMPOK		
			PEMULA	MADYA	LANJUT
1	SULAWESI SELATAN	127	77	42	8
2	SULAWESI TENGGARA	37	23	14	0
3	SULAWESI BARAT	16	10	6	0
	JUMLAH	180	110	62	8

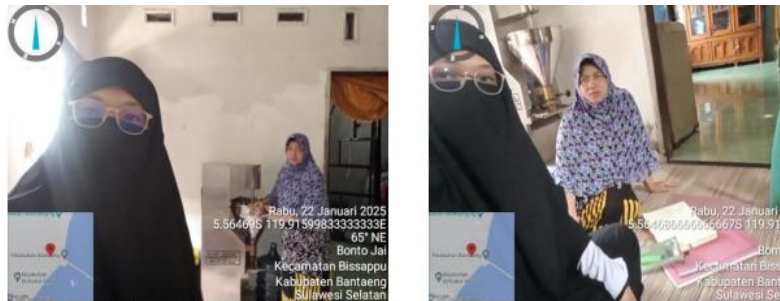
Sumber : Katimja Penyuluhan

Berdasarkan tabel data di atas menunjukkan bahwa mayoritas kelompok yang disuluh adalah kelas kelompok Pemula, yaitu 110 kelompok yang terbagi menjadi 77 kelompok di Sulawesi Selatan, 23 kelompok di Sulawesi Tenggara dan 10 kelompok di Sulawesi Barat sementara kelas kelompok Madya, yaitu 62 kelompok yang terbagi menjadi 42 kelompok di Sulawesi Selatan, 14 kelompok di Sulawesi Tenggara dan 6 kelompok di Sulawesi Barat Sedangkan untuk kelas kelompok lanjut ada 3 kelompok yang disuluh dengan rincian 1 kelompok di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat tidak ada kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum banyak kelas kelompok Madya maupun Utama, sehingga perlu didorong lagi kedepannya untuk peningkatan kelas kelompok Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan memiliki peran yang sangat penting dikarenakan penyuluhan bukan saja berperan dalam kegiatan prakondisi

masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan tetapi juga berintegrasi dengan fungsi pendampingan yang secara terus menerus sehingga tumbuh kemandirian dalam usaha kelautan dan perikanan yang akhirnya meningkatkan produktivitas usahanya.

Sasaran Pendampingan oleh Penyuluh Perikanan adalah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan Perikanan (Pokdakan, KUB, Poklahsar, Kugar dan Pokwaswas) dan pelaku utama perikanan perorangan.



Kunjungan Kelompok dalam kegiatan monitoring dan motivasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah dalam penggunaan alat pengolahan Bakso Ikan.
Rabu, 22 Januari 2025
Poklahsar Sipajului Kamp Mattoanging Desa Bonto Jai Kec. Bissappu Kab. Bantaeng

Sumber : Kegiatan Penyuluhan

Gambar 5. Kunjungan Kelompok dalam monitoring dan motivasi pemanfaatan bantuan pemerintah dalam penggunaan alat pengolahan Bakso Ikan



Sumber : Kegiatan Penyuluhan

Gambar 6. Musyawarah/Pertemuan dalam rangka Pembentukan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Sipakatutu.

Capaian IKU Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPBAPPP (kelompok) ini jika dibandingkan dengan 4 (empat) Satker lain lingkup BPPSDM KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) dengan Satminkal Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	150	180	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	100	110	110
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	50	53	106
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan	100	120	120

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua Satker capaiannya telah melebihi dari target tahunan dan semua nilai capaian rata-rata diatas 100%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang biasa dilakukan antara lain pembinaan dan pendampingan kelompok seperti pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses info dan teknologi, pembinaan UMKM dan koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan pemerintah.

Faktor penghambat : Ada beberapa penyuluh masih memasukkan profil geotangging tahun 2024 akhir/ 2025 awal sehingga dilakukan pengecekan kembali dan angung mengantikan di geogle drive.

Faktor pendukung yang menyebabkan IK ini dapat tercapai target triwulan I tahun 2025 karena setiap apel pagi selalu mengingatkan agar melaporkan capaian kelompok yang disuluh, dengan diadakannya data capaian IKU yang sesuai dengan manual IKU dijadikan sebagai Daduk SKP setiap individu penyuluh.

Faktor pendukung IKU ini adalah :

1. Penyuluhan terhadap kelompok merupakan salah satu tugas pokok penyuluh perikanan yang akan dituangkan di SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh Perikanan sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya.

2. Terbitnya Peraturan Kepala BPPSDM KP No. 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Penyuluh Perikanan, Asisten Penyuluh Perikanan, Penyuluh Perikanan P3K, dan Penyuluh Perikanan Bantu yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas serta target yang harus dicapai oleh penyuluh;
3. Kelompok pelaku utama dan Pelaku Usaha yang disuluh telah melakukan penyusunan profil kelompok/ data profil sebagai data dukung untuk IKU ini

Anggaran yang mendukung IKK Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) adalah RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 1.348.248.000 dan belum ada realisasi karena adanya blokir sebesar Rp 443.419.492 (kebijakan Blokir) Jika dibandingkan dengan persentase capaian NKO ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran karena adanya kebijakan Blokir

INDIKATOR 2

KELOMPOK PELAKU USAHA/PELAKU PENDUKUNG YANG DITINGKATKAN KELASNYA OLEH BRPBAPPP (KELOMPOK)

Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluh Kelautan dan Perikanan, dengan kriteria sesuai Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan, dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan setempat, Kepala BPPSDMKP sesuai dengan kriteria kelas kemampuan kelompok yang dikukuhkan dan mendapatkan piagam pengukuhan/ sertifikat apresiasi peningkatan kelas kemampuan kelompok.

Formula Perhitungan : Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/ pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang meningkat kelas kemampuan kelompoknya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke lanjut, kelas lanjut ke madya, kelas madya ke utama) dan jumlah pelaku usaha/ pelaku pendukung yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode triwulan sesuai dengan Permen KP no. 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Bukti dukungnya antara lain :

1. Data Kelompok Pelaku Usaha/ Pelaku Pendukung yang meningkat, beserta nama penyuluh perikanan
2. Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker
3. Dokumen penyampaian data dari Eselon III kepada Kepala Pusluh KP

Tabel 19. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
2	2	-	3	168.00	2.00	2.00	100.00	-33.33	0	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan tahun 2025

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian IKU triwulan I tahun 2025 ini memiliki target sebanyak 2 kelompok, capaiannya sebanyak 2 kelompok (100%).

Apabila melihat capaian pada tahun 2021-2024 diatas, capaian indikator tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 triwulan I capaiannya adalah sejumlah 2 kelompok dari target triwulan I sebesar 2 kelompok (100%). Pada tahun 2022 triwulan I capaiannya adalah sebesar 2 kelompok dari targetnya 1 kelompok (120%), dan pada tahun 2023 target dan capaian triwulan I belum ada. Pada tahun 2024 target triwulan I sebesar 1 kelompok, capaiannya sebesar 3 kelompok sehingga capaian triwulan I tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 33,33% akibat terhambatnya realisasi capaian IKU disebabkan penilaian peningkatan kelas kelompok pada umumnya mulai banyak diselenggarakan pada bulan Juni – November 2025, karena pada bulan-bulan sebelumnya melakukan proses identifikasi dan persiapan-persiapan. Sedangkan target pada renstra di triwulan I tahun 2025 belum ada karena renstra belum terima dari Eselon II.

Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan kelasnya pada tahun 2025 berdasarkan kelas kelompoknya terdiri dari : (1) Pemula sebanyak 324 kelompok ; (2) Madya sebanyak 1 kelompok, dan Utama 0 kelompok.

Adapun jumlah kelompok yang meningkat kelasnya sebanyak 325 kelompok meliputi bidang Budidaya sebanyak 162, bidang Penangkapan sebanyak 134, bidang Pengolahan sebanyak 27, bidang Pengawasan sebanyak 1, dan bidang garam sebanyak 1 kelompok disektor Kelautan dan Perikanan sampai Tahun 2024.

Peningkatan kelas kelompok berdasarkan Kepmen KP No.14 Tahun 2012 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, meliputi beberapa kriteria penilaian yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Penguasaan teknologi; 2. Pengorganisasian; 3. Skala Usaha; 4. Kemampuan Permodalan; 5. Kemitraan/Kerjasama; dan 6. Akses informasi pasar

Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh penyuluh perikanan dalam rangka peningkatan kelas kelompok adalah:

- a. Penyuluh perikanan kabupaten/kota menyiapkan instrument, menyusun dan menetapkan jadwal penilaian dan pelaporan hasil secara berjenjang;
- b. Penyuluh perikanan menetapkan metodologi penilaian;
- c. Penyuluh perikanan melakukan sosialisasi instrument, metodologi, jadwal dan pelaksana penilaian kepada Tim Penilaian;
- d. Penyuluh bersama Tim Penilai melakukan verifikasi dan hasil penilaian
- e. penilaian Peningkatan Kelas kelompok;
 - Kelas pemula dengan perolehan nilai ≤ 250 tetap sebagai Kelas Pemula
 - Kelas pemula dengan perolehan nilai $> 250 - 350$ disesuaikan sebagai kelas lanjut
 - Kelas madya dengan perolehan nilai $> 350 - 650$ tetap sebagai kelas madya
 - Kelas Utama dengan perolehan nilai $> 650 - 1000$ tetap sebagai kelas Utama
- f. Penyuluh Perikanan mengusulkan kenaikan kelas kelompok :
 - Kelas Pemula sertifikat pengukuhan oleh Lurah/ Desa setempat
 - Kelas Lanjut sertifikat pengukuhan oleh Camat setempat
 - Kelas lanjut ke Madya sertifikat pengukuhan oleh Dinas KP setempat
 - Kelas Madya ke Utama sertifikat pengukuhan oleh Kapus BPPSDMKP
- g. Penyuluh Perikanan mendampingi proses penerbitan sertifikat pengukuhan;
- h. Sertifikat pengukuhan diserahkan kepada kelompok perikanan.



Sumber : Data dari Katimja Penyuluhan triwulan I tahun 2025

Gambar 7. Kegiatan Penilaian Kelas Kelompok Perikanan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Maret 2025 di Kelompok Poklaksar “Marlo Jaya” Desa Mattirotasi Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian IK Kelompok Pelaku utama dan Pelaku Usaha KP yang ditingkatkan Kelasnya ini jika dibandingkan dengan Satminkal lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan Capaian IKU ini Triwulan I Tahun 2025 dengan Satker Lain

No	Satuan Kerja	Triwulan I		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	2	2	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan	1	1	100

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua Satker lingkup BPPBSDM memiliki nilai rata-rata diatas 100%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung capaian IK ini :

- Optimalisasi akses bantuan pemerintah dan pendataan kartu kusuka.
- Membuat standar SKP pada kelompok pengolahan
- Penyuluh telah melakukan kegiatan pendampingan kepada kelompok yakni melakukan penyuluhan dan melakukan penilaian kelas terhadap kelompok binaannya yang merupakan salah satu tugas pokok yang akan dituangkan ke dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Penyuluh sehingga setiap Penyuluh harus mencapai targetnya.

Anggaran yang mendukung IKK IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) adalah RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 1.348.248.000 dan belum ada realisasi karena adanya blokir sebesar 443.419.492 (kebijakan Blokir) Jika dibandingkan dengan persentase capaian NKO ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran karena adanya kebijakan Blokir

INDIKATOR KINERJA 3
KELOMPOK PELAKU USAHA/PELAKU PENDUKUNG YANG DIBENTUK OLEH
BRPBAPPP (KELOMPOK)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung kelautan dan perikanan yang dibentuk setelah mendapatkan pendampingan oleh Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dan dibentuk pada tahun berjalan, dengan kriteria pembentukan kelompok berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Formula Perhitungan : Hitung Jumlah kelompok pelaku usaha/pelaku pendukung kelautan dan dan perikanan yang dibentuk/ditumbuhkan dan memenuhi kriteria pembentukan kelompok dan/atau telah dikukuhkan oleh Instansi yang berwenang mengukuhkan berdasarkan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 21. Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)BRPBAPPP (Kelompok)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
211	147	15	144	510.00	6.00	10.00	120.00	-93.06	0	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa target triwulan I tahun 2025 sebanyak 6 kelompok, capaiannya 10 kelompok (120%), sedangkan capaian triwulan I tahun 2024 sebanyak 144 kelompok sehingga capaian di triwulan I tahun 2024 ke capaian triwulan I tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 93,06% hal ini disebabkan karena IK ini kegiatan baru akan banyak dilaksanakan pada triwulan II sehingga capaian baru sedikit.

Apabila melihat capaian pada tahun 2021-2024 diatas, capaian indikator tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun Pada triwulan I tahun 2021 capaiannya adalah sejumlah 211 kelompok dari target 150 kelompok (120%). Pada triwulan I tahun 2022 capaiannya sebesar 147 kelompok dari target 100 kelompok

(120%), pada triwulan I tahun 2023 capaiannya sejumlah 15 kelompok dari target 5 kelompok (120%) dan pada triwulan I tahun 2024 capaian sebesar 144 kelompok dari target sebesar 100 kelompok. Sedangkan target pada renstra di triwulan I tahun 2025 belum ada karena renstra belum terima dari Eselon II.

Membentuk kelompok adalah langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok dan pengembangan usaha berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diikuti dalam membentuk kelompok usaha Kelautan dan Perikanan (KP):

Identifikasi tujuan: Tentukan tujuan utama dari pembentukan kelompok KP. Misalnya, meningkatkan produksi perikanan, memperoleh akses ke pasar yang lebih baik, berbagi pengetahuan dan pengalaman, atau mendapatkan akses ke sumber daya dan layanan kelautan dan perikanan.

Identifikasi anggota potensial: Identifikasi pelaku usaha atau individu lain di wilayah yang memiliki minat dan kepentingan yang sama dalam usaha KP. Kontaklah mereka dan ajak mereka untuk menjadi bagian dari kelompok usaha KP.

Pertemuan awal: Atur pertemuan awal dengan anggota potensial untuk memperkenalkan gagasan dan tujuan pembentukan kelompok KP. Diskusikan manfaat yang mungkin diperoleh melalui kerja sama dan identifikasi isu atau tantangan yang dihadapi oleh para usaha sektor KP di wilayah tersebut.

Pembentukan struktur organisasi: Tentukan struktur organisasi kelompok, seperti kepengurusan, peraturan, dan tugas-tugas yang akan dijalankan. Misalnya, angkat seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota komite lainnya. Buat peraturan tentang keanggotaan, keputusan bersama, dan tanggung jawab anggota.

Pembagian tugas: Bagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota kelompok KP. Misalnya, satu anggota dapat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, sementara yang lain dapat mengurus hubungan dengan pemasok atau pembeli. Pastikan semua anggota memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam kelompok KP.

Pelatihan dan pendidikan: Selenggarakan pelatihan dan kegiatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok. Ini dapat meliputi pelatihan tentang praktik usaha KP terbaik, manajemen keuangan, pemasaran, atau teknologi kelautan dan perikanan yang inovatif. Kerjasama dengan

lembaga kelautan dan perikanan lokal atau organisasi non-pemerintah dapat membantu menyediakan sumber daya dan pendidikan yang diperlukan.

Rencana kegiatan: Bersama-sama, buat rencana kegiatan kelompok usaha KP. Tentukan jenis hewan yang akan dibudidayakan, jadwal pelaksanaan, metode pengelolaan, dan rencana pemasaran. Tetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya.

Kolaborasi dengan pihak terkait: Jalin kemitraan dengan pihak terkait seperti dinas perikanan, lembaga riset, atau lembaga keuangan. Hal ini dapat membantu mendapatkan akses ke sumber daya, teknologi, pembiayaan, dan pasar yang lebih luas.

Meningkatnya capaian indikator kinerja ini pada triwulan I tahun 2025 karena IKU ini dijadikan sebagai data dukung pada SKP setiap individu penyuluh. Capaian Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk ini berdasarkan keragaan bidang usahanya sebanyak 10 kelompok terdiri dari : (1) kelompok budidaya sebanyak 7 kelompok, (2) kelompok penangkapan sebanyak 3 kelompok.

Penumbuhan Kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tugas Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Adapun 2 tujuan dari kegiatan Penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut :

- Sebagai indikator kinerja bagi Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan; dan
- Sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, penyuluh perikanan melakukan identifikasi pelaku utama yang memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 2) Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.
- 3) Memiliki kesamaan dalam tradisi kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, atau bahasa.
- 4) Mandiri dan partisipatif
- 5) Merupakan binaan dari penyuluh perikanan



Sumber : Kegiatan Penyuluhan

Gambar 8. Kegiatan Kegiatan penumbuhan kelompok Katonik Super Desa Poreang

Kegiatan-kegiatan untuk mendukung capaian IKU ini :

- Pembinaan dan pendampingan kelompok seperti kunjungan ke kelompok, pendataan administrasi kelompok, melakukan fasilitasi akses modal, fasilitasi akses informasi, akses pasar, melakukan sosialisasi peraturan pemerintah terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.
- Masih banyaknya potensi di wilayah binaan penyuluh yang dapat ditumbuhkan menjadi kelompok baru sehingga penyuluh dapat mencapai targetnya.
- Fenomena bantuan pemerintah bagi kelompok aspirasi menjadi salah satu faktor pendukung dengan tumbuhnya kelompok-kelompok baru binaan Penyuluh.

Capaian IK ini jika dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan Capaian IK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) triwulan I tahun 2025 dengan Satker Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian		
		Target	Realisas	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	6	10	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	10	12	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	10	10	100

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata semua satker memiliki capaian diatas 100% dan hanya Satker BBRBLPP yang memiliki capaian 100%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggambarkan kontribusi BPPSDM KP dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat KP melalui penumbuhan dengan memenuhi kriteria pembentukan kelompok pelaku utama dengan didampingi penyuluh perikanan.

Penumbuhan Kelompok pelaku utama sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu tugas Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan. Tujuan dari kegiatan Penumbuhan Kelompok adalah sebagai berikut:

1. Sebagai indikator kinerja bagi Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan pendampingan kelompok perikanan; dan
2. Sebagai acuan dalam rangka pembinaan kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

Dalam melakukan kegiatan penumbuhan kelompok, Penyuluh perikanan melakukan identifikasi Pelaku Utama yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha sektor kelautan dan perikanan.
- b. Memiliki usaha sektor kelautan dan perikanan.
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi kebiasaan, domisili, lokasi usaha, status ekonomi, atau bahasa.
- d. Mandiri dan partisipatif.
- e. Merupakan binaan dari penyuluh perikanan

Penumbuhan kelompok pelaku utama dilaksanakan melalui tahapan:

1. Tahap Identifikasi Potensi Wilayah

Identifikasi potensi wilayah dilakukan oleh tokoh masyarakat yang didampingi penyuluh perikanan dengan dasar:

- a. potensi perikanan di wilayah setempat dengan melakukan kegiatan yang untuk mengetahui topografi dan informasi mengenai gambaran umum kondisi desa (kehidupan, kebiasaan, kecenderungan, kebutuhan aspirasi, potensi dan

masalah yang ada dimasyarakat) yang dilakukan secara partisipatif. Tujuan dari identifikasi wilayah ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah setempat sehingga akan diperoleh data dan informasi yang memberikan gambaran akurat mengenai potensi perikanan wilayah tersebut;

- b. keadaan ekonomi budaya masyarakat setempat dilakukan untuk mengukur kondisi sosial budaya dan ekonomi baik dalam hal kelembagaan, aturan, persepsi, partisipasi, sumber penghidupan masyarakat baik pendapatan dan pengeluaran masyarakat setempat;
- c. dinamika masyarakat perikanan setempat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial dan kelas sosial sebagai berikut :
 - Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat.
 - kelompok sosial adalah masyarakat yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat perikanan. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku para anggotanya.
 - Kelas sosial atau golongan sosial merujuk kepada perbedaan hierarkis (atau stratifikasi) antara individu atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya.

2. Tahap Pelaksanaan Penumbuhan

Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan kepada pelaku utama dalam membentuk kelompok dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi penumbuhan kelompok kepada pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha kelautan dan perikanan tentang hasil identifikasi potensi wilayah.
- b. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan tatap muka dengan pelaku utama dengan melampirkan daftar hadir dan notulen hasil sosialisasi.
- c. Melakukan pertemuan lanjutan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, pelaku utama, pelaku usaha perikanan untuk membentuk kelompok, menyusun struktur organisasi, memilih pengurus kelompok,

menyusun anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, dan membuat Berita Acara pengukuhan kelompok.

- d. Kelompok yang sudah terbentuk dilakukan pengukuhan dengan menerbitkan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah, kepala desa atau sejenisnya) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota.

Faktor keberhasilan IKU ini karena bagian Penyuluhan selalu berkoordinasi dan mengingatkan terus dengan seluruh penyuluh utama para Korluh untuk selalu membimbing staf penyuluh supaya bisa mencapai target IKU Tahunan dan Indikator Kinerja balai sudah dijadikan sebagai Indikator Kinerja setiap penyuluh perikanan.

Anggaran yang mendukung IKK Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok) adalah RO Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP dengan anggaran sebesar Rp. 1.348.250.000 dan belum ada realisasi karena adanya blokir sebesar Rp. 443.194.390 (kebijakan Blokir) telah terealisasi sebesar Rp. 7.725.409.560 (99,991%). Jika dibandingkan dengan persentase capaian NKO ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran karena adanya kebijakan Blokir

INDIKATOR KINERJA 4

NILAI PNBP SATKER BRPBAPPP (RUPIAH MILYAR)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor Kelautan dan Perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

- c. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Cara pengukuran indikator kinerja ini yakni Nilai PNBP Sektor Kelautan dan Perikanan = Nilai PNBP SDA + Nilai PNBP Lainnya. Bukti capaian IK ini Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya dan/atau surat penyampaian realisasi PNBP dari Sekretariat BPPSDM KP.

Tabel 23. Capaian IK Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)

Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	0.544	297	1.62	0.15	0.20	120.00	-99.93	0.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian triwulan I tahun 2025 sebesar 0,20 Rupiah Milyar sudah melebihi dari target triwulan I tahun 2025 1,62 Rupiah Milyar, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 99,93 karena adanya efisiensi anggaran.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru ditahun 2021-2022. Tahun 2023 IK ini capaian triwulan I sebesar 0,544 Rupiah Milyar dari target sebesar 0,500 Rupiah Milyar. Pada triwulan I tahun 2024 capaiannya sebesar 297.765.636 Rupiah dari targetnya sebesar 52.650.000. Sedangkan target pada renstra di triwulan I tahun 2025 belum ada karena Renstranya belum terima dari Eselon II.

Tabel 24. Nilai PNPB BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2025 ini berasal dari penerimaan fungsional dan umum dari beberapa akun

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0	9,758,904	0	9,758,904
2	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	768,829	0	768,829
3	425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,240,000	0	0	0	0	8,240,000
4	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	376,843	0	0	0	0	376,843
5	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	2,027,000	0	0	0	0	2,027,000
6	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	5,250,000	0	0	0	0	5,250,000
7	411618 Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	4,570,142	0	0	0	0	0	4,570,142
8	425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	172,902,500	0	0	0	0	172,902,500
GRAND TOTAL		4,570,142	188,796,343	0	0	10,527,733	0	203,894,218

Sumber : Aplikasi Omspan

Capaian IKU ini sebanyak 0,20 Rupiah Milyar, target sebesar 1.62 Rupiah Milyar. Analisa capaian PNPB untuk kegiatan pendapatan sewa tanah, gedung dan Bangunan, Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, pendapatan dari penjualan tanah gedung dan bangunan, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin hingga pendapatan penjualan hasil pertanian perkebunan peternakan dan budidaya sesuai dengan capaian PNPB per Akun pada Aplikasi Omspan triwulan I tahun 2025.

Tabel 25. Penerimaan PNPB BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Penerimaan	Triwulan I
1	Penerimaan Umum	Rp. 25.741.718
2	Penerimaan Fungsional	Rp. 178.152.500
Jumlah Penerimaan s.d Triwulan I		Rp. 203.894.218
#Dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus delapan belas rupiah #		

Sumber : Surat Penyampaian dari Bendahara Penerimaan PNPB

**REKAPITULASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN
PERIODE JANUARI SD MARET 2025**

BULAN	AKUN	NAMA AKUN	JUMLAH	
			FUNGSIONAL	UMUM
Januari	425131	Pendapatan Sewa Tanah , Gedung dan bangunan		2,554,113
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		343,543
	425811	Pendapatan Denda penyelesaian Pekerjaan pemerintah		768,829
	425112	Pendapatan Penjualan hasil Pertanian , Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	25,500,000	
Februari	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		2,027,000
	425131	Pendapatan Sewa Tanah , Gedung dan bangunan		2,381,315
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		33,300
	425112	Pendapatan Penjualan hasil Pertanian , Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	114,502,500	
	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya	5,250,000	
Maret	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah Gedung dan Bangunan		8,240,000
	425131	Pendapatan Sewa Tanah , Gedung dan bangunan		4,823,476
	411618	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit		4,570,142
	425112	Pendapatan Penjualan hasil Pertanian , Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	32,900,000	
Jumlah			178,152,500	25,741,718
Total PNPB Umum Dan Fungsional sd 10 April 2025				203.894.218

Sumber : Aplikasi Ompan

Gambar 9. Screenshoot Rekap PNPB Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja Nilai PNPB Satker BRPBAPPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk indikator kinerja Nilai PNPB Satker BRPBAPPP dengan Satker lingkup Pusat Penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lain Lingkup Pusluh

No	Satuan Kerja	Capaian		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	0,15	0,2	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0,01	0,03	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	0,01	0,02	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	0,02	0,05	120

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata Satker memiliki capaian 120%. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah penyusunan proposal

PNBP agar dapat dilakukan dengan lebih detail sehingga potensi penerimaan PNBP dapat lebih dioptimalkan sesuai dengan tusi balai kedepannya.

Faktor pendukung yang menyebabkan IK ini berhasil mencapai target triwulan I tahun 2025 adanya penentuan Target PNBP per triwulan dan monitoring yang dilakukan oleh Tim Setba PNBP dan Tim Monev BRPBAPPP, namun akan dilakukan revisi PNBP hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBAPPP, monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pualuh dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBAPPP dengan Kepala Pusluh, memasukkan indikator kinerja ini ke dalam SKP pegawai.

Anggaran yang mendukung IKK Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar) adalah RO Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan Umum, Pelayanan RT dan Perlengkapan Penyuluhan KP) dengan anggaran sebesar Rp. 40.330.000,- belum ada terealisasi. Jika dibandingkan dengan persentase capaian NKO sebesar 120% maka belum bisa diukur efisiensi anggarannya karena anggarannya masih diblokir.

INDIKATOR KINERJA 5

GABUNGAN KELOMPOK/KOPERASI/KORPORASI YANG MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DI BRPBAPPP (UNIT)

Merupakan Indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. Formula Perhitungan adalah Jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan. Bukti dukung antara lain :

- Data Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan;
- Data yang disajikan legal (dokumen/matrik) ditandatangani Kepala Satker;
- Dokumen penyampaian data dari Eselon III kepada Kepala Pusluh KP.

Tabel 27. Capaian IK Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)

Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)BRPBAPPP (Kelompok)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	43.00	2.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian triwulan I tahun 2025 sebesar 3 Unit dari targetnya sebesar 2 Unit (120%) tidak bisa dibandingkan karena IK baru.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dari tahun sebelumnya. Dan tidak bisa juga dibandingkan dengan rentras 2025 karena restra Eselon II belum terima.



Sumber : Katimja Penyuluhan

Gambar 10. Kegiatan Pembentukan Gabungan Kelompok Kelautan Dan Perikanan Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo

Gabungan Kelompok Klasifikasi kelembagaan capaiannya ada 2 antara lain : Gapokkan ada 2 unit (Gapokkan Bintang Pesisir dan Gapokkan Sipurennu) dan koperasi ada 1 unit (Koperasi Tani Nelayan Tekolabbua).

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja ini untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk indikator kinerja ini. Capaian IK ini jika dibandingkan dengan Satker lingkup Pusat Penyuluhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lain Lingkup Pusluh

No	Satuan Kerja	Capaian		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	2	3	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	5	5	100
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	1	2	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	1	1	100

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata 2 Satker yang memiliki capaian sebesar 120% yakni : BRPBAPPP dengan BRPBATPP. Ada 2 Satker yang memiliki capaian sebesar 100% yakni : BRPPUPP dengan BBRBLPP. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya.

Anggaran yang mendukung IKK Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit) adalah RO Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 59.135.000,- dan belum ada terealisasi. Jika dibandingkan dengan persentase capaian NKO ini sebesar 120% maka belum adanya efisiensi anggaran karena adanya blokir anggaran.

SASARAN KEGIATAN 2.

TERSELENGGARANYA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan kedua pada triwulan I tahun 2025 yakni Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung 2 indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut.

INDIKATOR KINERJA 6**MEDIA PENYULUHAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKU USAHA DI SATKER BRPBAPPP (PAKET)**

Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah Materi/ Metode Penyuluhan yang disusun oleh BRPBAPPP, Penyuluh kelautan dan perikanan yang bersifat informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan. Formula Perhitungan yakni Hitung jumlah Materi dan/atau Metode Penyuluhan yang Ditetapkan. Bukti dukung yakni : Paket materi penyuluhan (dalam bentuk *softfile*).

Tabel 29. Capaian IK Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)

Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian dan target triwulan I tahun 2025 belum ada dan capaiannya dengan Satker lain belum bisa dibandingkan karena pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun/ triwulan IV tahun 2025. Dan belum bisa dibandingkan juga dengan renstra 2025 karena renstra Eselon II belum diterima. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

Anggaran yang mendukung IKK Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket) adalah RO Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 59.135.000,- ,- dan belum ada realisasi. Belum ada capaian NKO karena adanya blokir anggaran.

INDIKATOR KINERJA 7**PERCONTOHAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG DITERAPKAN OLEH BRPBAPPP (KELOMPOK)**

Merupakan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan teknologi tepat guna dari teknologi terekomendasi Teknologi terekomendasi yang dilaksanakan disesuaikan dengan kondisi teknis, lingkungan, social, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan. Hasil dari Percontohan penyuluhan berupa inovasi teknologi tepat guna. Percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan ini bertujuan untuk memperoleh inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik teknis, lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di lokasi penyuluhan dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan keberlanjutan sumber daya KP. Formula Perhitungan yakni : Hitung jumlah kelompok yang mendapatkan percontohan penyuluhan KP dalam kegiatan *Smart Fisheries Village* upt dan/atau desa. Bukti dukung yakni :

Tabel 30. Capaian IK Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)

Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok) Mendapatkan Perizinan Berusaha di Satker BRPBAPPP (Pelaku Usaha)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian dan target triwulan I tahun 2025 belum ada dan capaiannya dengan Satker lain belum bisa dibandingkan karena pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun/ triwulan IV tahun 2025. Dan belum bisa dibandingkan juga dengan renstra 2025 karena renstra Eselon II belum diterima. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

Anggaran yang mendukung IKK Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket) adalah RO Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 59.135.000,- ,- dan belum ada realisasi. Belum ada capaian NKO karena adanya blokir anggaran.

SASARAN KEGIATAN 3 TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sasaran kegiatan ketiga pada triwulan I tahun 2025 yakni Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan didukung 2 indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut.

INDIKATOR KINERJA 8 JUMLAH PENYULUH PERIKANAN YANG LULUS PENILAIAN KOMPETENSI DI BRPBAPPP (ORANG)

Merupakan indikator yang menunjukkan Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan PNS yang mengikuti lulus penilaian kompetensi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi/ Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Biro SDMAO KKP. Formula Perhitungan yakni : Hitung jumlah penyuluh kelautan dan perikanan PNS yang lulus penilaian kompetensi yang dilakukan oleh *Assesment Center* KKP.

Tabel 31. Capaian IK Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)

Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian dan target triwulan I tahun 2025 belum ada dan capaiannya dengan Satker lain belum bisa dibandingkan karena pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun/ triwulan IV tahun 2025. Dan belum bisa dibandingkan juga dengan renstra 2025 karena renstra Eselon II belum diterima. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

Anggaran yang mendukung IKK Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket) adalah RO Penyuluh Perikanan yang

Bersertifikat Kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dan belum ada realisasi. Belum ada capaian NKO karena adanya blokir anggaran.

INDIKATOR KINERJA 9

JUMLAH PENYULUH KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG LULUS PELATIHAN TEKNIS DI BRPBAPPP (ORANG)

Merupakan indikator yang menunjukkan presentase jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan merupakan jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan perikanan yang lulus pelatihan teknis}}{\text{Jumlah penyuluh kelautan dan perikanan per Januari 2025}} \times 100\%$$

Bukti dukung yakni : Data Penyuluh kelautan dan Perikanan yang lulus Sertifikasi Pelatihan Teknis *by name by address* beserta link Sertifikat/ Surat Keterangan dari Penyelenggara, dan Data yang disajikan merupakan legal terdapat pengesahan pimpinan

Tabel 32. Capaian Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)Penyuluhan di Satker BRPBAPPP (Kawasan)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian dan target triwulan I tahun 2025 belum ada dan capaiannya dengan Satker lain belum bisa dibandingkan karena pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun/ triwulan IV tahun 2025. Dan belum bisa dibandingkan juga dengan renstra 2025 karena renstra Eselon II belum diterima. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

SASARAN KEGIATAN 4**TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Sasaran kegiatan keempat pada triwulan I tahun 2025 yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung 8 indikator kinerja (IK) yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut.

INDIKATOR KINERJA 10**KEMITRAAN YANG DISEPAKATI DAN/ATAU DITINDAKLANJUTI DI SATKER BRPBAPPP (DOKUMEN)**

Jumlah dokumen kerja sama Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan antar lembaga dan internasional yang ditandatangani/ disepakati sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN KP/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Formula pengukuran: Hasil inventarisasi dan perhitungan dokumen Kerjasama lingkup antar Lembaga dan internasional dan disepakati Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bersama para pihak kerja sama. Bukti capaian akhir dari indikator kinerja ini Dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani.

Capaian indikator kinerja Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33. Capaian Kinerja IK 10 Triwulan I Tahun 2025

Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)											
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)		
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029	
-	-	-	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diperoleh kesimpulan bahwa capaian dan target triwulan I tahun 2025 belum ada dan capaiannya dengan Satker lain belum bisa dibandingkan karena pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada akhir tahun/ triwulan IV tahun 2025. Dan belum bisa dibandingkan juga dengan renstra 2025

karena renstra Eselon II belum diterima. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

Anggaran yang mendukung IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPBAPPP (Dokumen) adalah RO Layanan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi dengan anggaran Rp. 16.144.000,- dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir sebesar Rp. 4.316.294,- belum ada NKO sehingga belum ada efisensi anggaran.

INDIKATOR KINERJA 11

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA BRPBAPPP (%)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sampai dengan waktu pengukuran. Formula perhitungan adalah

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi ITJEN yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusat Penyuluhan KP}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang diberikan kepada Pusat Penyuluhan KP}} \times 100\%$$

Bukti dukung : Surat penyampaian hasil Rekomendasi Pengawasan dari Sekretariat BPPSDM KP ini dapat dilihat pada tabel berikut :

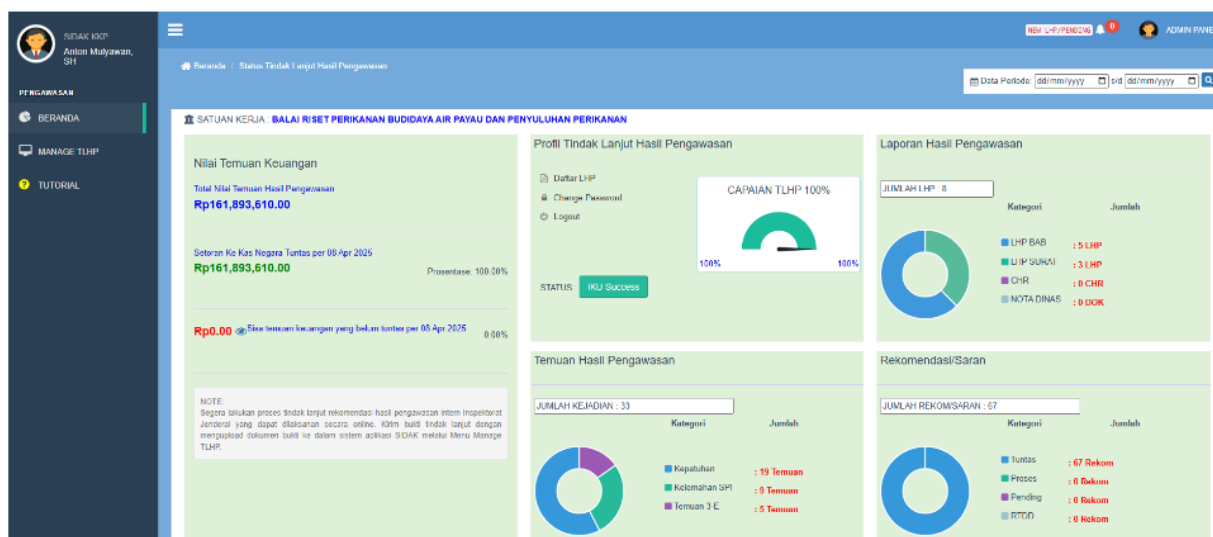
Tabel 34. capaian Indikator Kinerja Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	75	100	85.00	85.00	85.00	100.00	-15.00	0.00	0.00

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, tahun 2024

Pada triwulan I tahun 2025 ini, capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP adalah sebesar 85% (100%) dari target 85%. , jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 15% dan Sedangkan target pada renstra di triwulan I tahun 2025 belum ada karena Renstranya belum terima dari Eselon II.

Capaian indikator kinerja tersebut disampaikan oleh BPPSDM KP KP melalui surat dari Setba dengan nomor B. 3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal “Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan I Tahun 2025”. Berdasarkan surat tersebut, BRPBAPPP telah mencapai indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPBAPPP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan pada triwulan I tahun 2025 sebesar 85% (100%). Tindak lanjut temuan LHP surat telah dituntaskan 100% pada tahun 2024, dan sampai saat ini belum ada temuan yang perlu ditindak lanjuti baik diluar Aplikasi SIDAK maupun yang masuk dalam Aplikasi SIDAK.



Sumber : Aplikasi SIDAK KKP.go.id

Gambar 11. Screenshoot aplikasi SIDAK KKP satker BRPBAPPP Maros

Faktor pendukung yang menyebabkan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP mencapai target pada Triwulan I tahun 2025 ini antara lain:

- Melaksanakn koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat BPPSDMKP terkait aplikasi SIDAK yang memuat progress tindak lanjut rekomendasi dari Itjen KKP;
- Melaksanakan koordinasi dengan Itjen KKP terkait rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau Berita Acara Tindak Lanjut kegiatan evaluasi, pemantauan maupun audit yang dilaksanakan di BRPBAPPP;

Kegiatan yang dapat menjadi penunjang keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain

- Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan di internal BRPBAPPP melalui kegiatan pengukuran kinerja yang dilaksanakan per Triwulan di internal BRPBAPPP,
- Monitoring capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pusluh KP melalui kegiatan pengukuran capaian kinerja per triwulan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala BRPBAPPP dengan Kepala Pusluh KP
- Memasukkan ke dalam SKP pegawai terkait dengan pemantauan dokumen tindak lanjut.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP untuk kedepannya, maka perlu dilakukan perbandingan persentase capaian pada indikator tersebut dengan satker yang lain. Satker yang akan dilakukan perbandingan adalah satker eks riset yang dibawah koordinasi Pusat Penyuluhan KP. Berikut perbandingan capaian untuk indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP. Capaian IKU ini jika dibandingkan dengan Satker lingkup Pusat Penyuluhan KP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Perbandingan Capaian IK ini dengan Satker Lingkup Pusluh KP.

No	Satuan Kerja	Capaian Per Satminkal		
		Target	Realisasi	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	0	0	0
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	85	85	100

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Kalau dibandingkan dengan satker lain maka hanya Satker BRPPUPP yang tidak ada target dan capaian pada IK ini.. Capaian kinerja untuk indikator kinerja ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya.

Anggaran yang mendukung IKK Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPBAPPP (Dokumen) adalah RO Layanan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan anggaran Rp. 9.500.000,- dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir, NKO sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA 12

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN BRPBAPPP (NILAI)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Formula Perhitungan : Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Bukti akhir capaian indikator kinerja ini adalah berupa: Aplikasi OM SPAN dan/atau Surat/Nota Dinas Biro Keuangan. Capaian Indikator Kinerja (IK) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPP Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja IK ini Pada Triwulan I tahun 2025

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2025 ini, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) belum ada capaian dan capaian IK ini juga tidak bisa dibandingkan dengan Satker lain karena pengukuran kinerja dilakukan per semester. Renstranya juga belum bisa diukur karena Restra Eselon II belum diterima.

Adapun Progress kegiatannya pada akhir Maret 2025 yakni :

Tabel 37. Progress Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) sampai dengan Maret 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00	100.00				100.00					

Sumber : Aplikasi Omopsan Bulan Maret 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Nilai Akhir sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebesar 100%. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai) adalah RO Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan anggaran Rp. 9.500.000,- dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir, NKO sebesar 100%.

INDIKATOR KINERJA 13

PENILAIAN MANDIRI SAKIP BRPBAPPP (NILAI)

Definisi dari indikator kinerja ini adalah Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Formula Perhitungan adalah Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rilis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Bukti dukungnya adalah Surat Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Pusluh KP dari Sekretariat BPPSDM KP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Sumber : Manual IKU BRPBAPPP Triwulan I TA. 2025

Capaian Indikator Kinerja (IK) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP Triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja (IK) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP Triwulan I tahun 2025

Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)(%)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2025 ini, target dan capaiannya belum ada serta capaian IK ini juga tidak bisa dibandingkan dengan Satker lain karena pengukuran kinerja akan dilakukan pada triwulan IV/ akhir tahun 2025. Renstranya juga belum bisa diukur karena Restra Eselon II belum diterima. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

Anggaran yang mendukung IKK Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai) adalah RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan anggaran Rp. 23.000.000,- dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir, NKO belum ada sehingga belum bisa diukur efisiensi anggarannya.

INDIKATOR KINERJA 14

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN BRPBAPPP (NILAI)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui Aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Bukti Dukung : Nota Dinas Setba

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$\text{NKPA Satker} = (\text{CRO} \times W_{\text{CRO}}) + (\text{Penggunaan}_{\text{SBK}} \times W_{\text{Penggunaan}_{\text{SBK}}}) + (\text{NE}_{\text{Alokasi}} \times W_{\text{NE}_{\text{Alokasi}}})$$

Keterangan:

NKA Satker : Nilai Kinerja Satker CRO : Capaian RO

Penggunaan_{SBK} : Penggunaan SBK NE_{Alokasi} : Nilai Efisiensi Alokasi W_{CRO} : Bobot Capaian RO

Variabel	Uraian	Bobot (%)
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektifitas Satker	45
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Sumber : Manual IKU Januari 2025

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja NKPA Triwulan I TA 2025

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2025 ini, target dan capaiannya belum ada serta capaian IK ini juga tidak bisa dibandingkan dengan Satker lain karena pengukuran kinerja akan dilakukan pada triwulan IV/ akhir tahun 2025. Renstranya juga belum bisa diukur karena Restra Eselon II belum diterima.

Tabel 40. Progress IK NKPA Jan-Maret 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	032.12.403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	0,17	0,22	0,00	0,00

Sumber : Sistem Aplikasi SMART DJA triwulan I tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa progress IK NKPA sampai dengan Maret 2025 dengan nilai sebesar 0,17% dimana capaian RO sebesar 022%. Capaian untuk IK ini tetap dilakukan monitoring sehingga bisa tercapai target tahunan pada akhir tahun 2025.

Anggaran yang mendukung IKK Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai) adalah RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran dengan anggaran Rp. 23.916.000,- dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir, NKO belum ada sehingga belum bisa diukur efisiensi anggarannya

INDIKATOR KINERJA 15

INDEKS PROFESIONALITAS ASN BRPBAPPP (INDEKS)

Definisi dari indikator kinerja ini meliputi :

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Formula Perhitungan: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi, (b) Kompetensi; (c) Kinerja; dan (d) Disiplin. Surat Penyampaian Hasil Nilai IP ASN dari Sekretariat BPPSDM KP

$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$	$W_{1j} * R_{1j} = \text{Bobot Indikator Kualifikasi ke-j} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j}$ $W_{2k} * R_{2k} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-k} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k}$ $W_{3l} * R_{3l} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-l} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l}$ $W_{4m} * R_{4m} = \text{Bobot indikator Kualifikasi ke-m} * \text{Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m}$
--	---	---

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Sumber : Manual IKU Januari 2025

Tabel 41. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRBPAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TWI	Realisasi TWI	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	1,400	81.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-100.00	83.00	0.00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2025 ini, target dan capaiannya belum ada serta capaian IK ini juga tidak bisa dibandingkan dengan Satker lain karena pengukuran kinerja akan dilakukan pada triwulan IV/ akhir tahun 2025. Renstranya juga belum bisa diukur karena Renstra Eselon II belum diterima. Untuk Progress IP ASN belum ada pada Aplikasi Ropeg.id.

Anggaran yang mendukung IKK Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks) adalah RO Layanan Manajemen SDM (Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Riset Perikanan) dengan anggaran Rp. 18.690.000,-

dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir, NKO belum ada sehingga belum bisa diukur efisiensi anggarannya.

INDIKATOR KINERJA 16

PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP BRPBAPPP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Bukti Dukung : Surat/Nota Dinas Biro Umum dan PBJ.

Tabel 42. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%) Atas LK BRPBAPPP (%)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	80.00	80.00	100.00	120.00	0.00	90.00	111.11

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2025 ini, sudah ada capaian triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dari targetnya sebesar 80% (120%), sedangkan tahun 2021-2024 belum ada capaian karena IK ini merupakan IK baru di tahun 2025. Renstranya juga belum bisa diukur karena Restra Eselon II belum diterima. Capaian IK ini jika dibandingkan dengan Satker lingkup BPPSDM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Perbandingan Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%) triwulan I tahun 2025 dengan Satker Lain.

No	Satuan Kerja	Capaian		
		Target	Realisas	%
1	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
2	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
3	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120
4	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	80	100	120

Sumber : Sistem Aplikasi Kinerjaku <https://kinerjaku.kkp.go.id>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata semua satker memiliki capaian 120%. Untuk kedepannya, diharapkan capaiannya dapat lebih ditingkatkan lagi salah satunya melalui pemantauan terhadap kinerja penyuluh perikanan agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Anggaran yang mendukung IKK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%) adalah RO Layanan Manajemen Keuangan dengan anggaran Rp. 18.420.000,- dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir, NKO belum ada sehingga belum bisa diukur efisiensi anggarannya.

INDIKATOR KINERJA 17**TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DI BRPBAPPP (%)**

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Formula

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:

a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)

b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);

5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

6. Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Tabel 44. Capaian IK 17

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)										
Realisasi				TA. 2025					Renstra BRPBAP3 2025-2029 (Reviu Renstra)	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	0	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00

Sumber : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), <https://kinerjaku.kkp.go.id/>, triwulan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas bahwa pada triwulan I tahun 2025 ini, belum ada capaian karena pengukurannya dilakukan pada akhir tahun 2025, sedangkan tahun 2021-2024 belum ada capaian dan tidak bisa dibandingkan dengan Satker lain juga karena IK ini merupakan IK baru di tahun 2025. Renstranya juga belum bisa diukur karena Restra Eselon II belum diterima.

Anggaran yang mendukung IKK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%) adalah RO Layanan BMN dengan anggaran Rp. 10.000.000,- dan belum ada realisasi karena ada anggaran yang diblokir, NKO belum ada sehingga belum bisa diukur efisiensi anggarannya.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025 meliputi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPBAPPP Tahun 2025 meliputi 2 (dua) program yaitu : Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Program Dukungan Manajemen dengan rincian pagu kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.854.151.000,-
2. Program Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran sebesar Rp. 91.883.143.000,- .

Pada tanggal 2 Januari 2025 Pagu awal anggaran sebesar Rp. 97.737.294.000,- Pada tanggal 25 Februari 2025 terjadi Revisi anggaran disebabkan adanya Efisiensi Anggaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 97.737.294.000,- Untuk realisasi per tanggal 31 Maret 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp 24.445.474.015,- (98,06%),- yang berasal dari total pagunya sebesar Rp. 97.096.937.000,- Belanja pegawai realisasi sebesar Rp 21.801.845.412,- (26,84%),- dengan pagu sebesar Rp. 81.233.143.000 , -Belanja barang realisasi sebesar Rp 2.643.628.603,- (16,66%) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.863.794.000,-

Tabel 45. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025

NO	BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	81.233.143.000	21.801.845.412	26,84
2	Belanja Barang	15.863.628.603	2.643.628.603	16,66
3	Belanja Modal	0	0	0
TOTAL		97.096.937.000	24.445.474.015	25,18

Sumber : Data Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2025

Tabel 46. Pagu dan Anggaran Triwulan I Tahun 2024

NO	BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	88.109.923.000	20.633.466.306	23,42

2	Belanja Barang	25.348.927.000	3.228.138.079	12,73
3	Belanja Modal	427.174.000	0	0
TOTAL		113.886.024.000	23.861.604.385	20,95

Sumber : Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran triwulan I tahun 2025 dengan anggaran triwulan I tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 4,23% dilihat secara persentase namun jika dilihat dari jumlah realisasi anggaran mengalami peningkatan hal ini karena anggaran semakin meningkat namun tidak ada belanja modal pada tahun 2025 dan realisasi hanyaa pada Belanja Pegawai dan Belanja Operasional.Sedangkan anggaran yang lainnya masih dalam blokir.

Tabel 47. Revisi DIPA BRPBAPPP Triwulan I tahun 2025.

No.	Uraian	Tanggal Terbit DIPA/ Revisi	Pagu (Rp.)	Keterangan
1	Awal	2 Januari 2025	97.737.294.000	-
2	Revisi ke 01	25 Feb 2025	97.737.294.000	Revisi Efisiensi
3	Revisi ke 02	20 Maret 2025	97.096.937.000	Revisi Rekomposisi Blokir (Gaji PPB)
4	Revisi ke 03	9 April 2025	97.096.937.000	Revisi Relaksasi Blokir 2025

Sumber : Bagian Anggaran RKAKL Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian Sasaran Kegiatan dari 4 (empat) Program yang dilaksanakan BRPBAPPP pada triwulan I tahun 2025, maka selanjutnya dijabarkan kedalam Aktivitas, Klasifikasi Rincian Output (KRO), dan Rincian Output (RO) sebagaimana berikut ini :

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan : Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output :
 - 1) Penyuluh Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi, Rincian Output :
 - a. Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyuluh Perikanan (18 Orang)
 - 2) Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok, Rincian Output :
 - a. Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan kepada Kelompok Masyarakat KP
 - b. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan/Penerapan Model Pemberdayaan Ekonomi.
2. Program Dukungan Manajemen

- 1) Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output: Layanan Dukungan Manajemen Internal ada 3 Layanan yaitu :
 - a. Layanan BMN (1 layanan)
 - b. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (1 layanan)
 - c. Layanan Umum (1 layanan)
 - d. Layanan Perkantoran (1 Layanan).
- 1) Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output : Layanan Manajemen SDM Internal (1 Layanan)
- 2) Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3 Layanan)
 - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (1 dokumen)
 - b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (1 dokumen)
 - c. Layanan Manajemen Keuangan (1 dokumen)
 - d. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (1 dokumen)

Dalam mencapai target Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan di triwulan I tahun 2025 maka diperlukan alokasi anggaran untuk masing-masing Indikator Kinerja serta Sasaran Kegiatan. Berikut adalah tabel realisasi anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 48. Realiasi Anggaran Per Indikator Kinerja Manajerial Triwulan I Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN s.d. TRIWULAN II	TARGET PK	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	NARASI CAPAIAN (Faktor pendukung/penghambat dan kegiatan pendukung/solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Katimja Penyuluhan, Bagian Penyuluhan	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan	1.348.248.000	443.419.492 (kebijakan Blokir)	5,005	5,005	Triwulan	IKU nya sudah mencapai target triwulan. Diman target triwulan 1 sebesar 150 kelompok dan capaiannya sebesar 180 kelompok
	2 Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)			1.348.248.000	443.419.492 (kebijakan Blokir)	168	168	Triwulan	IKU nya sudah mencapai target triwulan. Diman target triwulan 1 sebesar 2 kelompok dan capaiannya sebesar 2 kelompok

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN s.d. TRIWULAN II	TARGET PK	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	NARASI CAPAIAN (Faktor pendukung/penghambat dan kegiatan pendukung/solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)		1.348.250.000	443419490 (kebijakan Blokir)	510	510	Triwulan	IKU nya sudah mencapai target triwulan. Diman target triwulan 1 sebesar 6 kelompok dan capaiannya sebesar 10 kelompok
	4	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	Katimja Umum , Bagian Keuangan/ Benda hara Penerimaan	40,330,000	blokir	1.6238	1.6238	Triwulan	Realisasi pada triwulan 1 di Aplikasi OMSPAN sebesar Rp. 203.894.218 sehingga sudah melebihi target triwulan 1 sebesar Rp. 1.6238.000
	5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)		597,135,000	blokir	43	43	Triwulan	IKU nya sudah mencapai target triwulan. Diman target triwulan 1 sebesar 2 kelompok dan capaiannya sebesar 3 kelompok
Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	Katimja Penyuluhan, Bagian Penyuluhan	597,135,000	blokir	1	1	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan
	7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)		597,135,000	blokir	3	3	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan
Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan	8	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)		9,000,000	blokir	18	18	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA		UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN s.d. TRIWULAN II	TARGET PK	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	NARASI CAPAIAN (Faktor pendukung/penghambat dan kegiatan pendukung/solusi)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Perikanan	9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)			9,000,000	blokir	12	12	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	Katimaja Umum, Bagian Humas	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	16,144,000	4.316.294 (kebijakan blokir)	1	1	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan
	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	Katimaja Umum, Bagian Perencanaan	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9,500,000	blokir	85	85	Triwulan	Tidak ada temuan pada Aplikasi SIDAK dan berdasarkan Surat Setba nomor B.3218/BPPSDM. 1/HP.510/IV/2025
	12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Katimaja Umum, Bagian Keuangan dan Perencanaan	Layanan Perkantoran 001. Gaji dan Tunjangan 002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	91723143000	30,930,489,383	92	92	Semesteran	Pengukuran kinerja dilakukan per semester
	13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Katimaja Umum, Bagian Perencanaan	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	23,000,000	blokir	81	81	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan
	14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Katimaja Umum, Bagian Perencanaan	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	23,916,000	blokir	71.5	71.5	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan
	15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Katimaja Umum, Bagian Kepegawaian	Layanan Manajemen SDM (Pelayanan Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Riset Perikanan)	18,690,000	blokir	81	81	Semesteran	Pengukuran kinerja dilakukan per semester

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN PENDUKUNG	ALOKASI ANGGARAN (Rp.000)	REALISASI ANGGARAN s.d. TRIWULAN II	TARGET PK	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	NARASI CAPAIAN (Faktor pendukung/penghambat dan kegiatan pendukung/solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	16 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	Katimja Umum, Bagian PBJ	Layanan Manajemen Keuangan	18,420,000	blokir	80	80	Triwulan	Data sementara Rekapitulasi RUP Aplikasi SIRUP lingkup BPPSDM sebesar 100% dari target tw 1 sebesar 80% dan Surat Setba nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025
	17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	Katimja Umum, Bagian Keuangan	Layanan BMN	10,000,000	blokir	80	80	Tahunan	Pengukuran kinerja dilakukan Tahunan

Sumber Bagian Monev Realisasi Per IKK

Secara umum, kinerja BRPBAPPP sampai Triwulan I Tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti:

1. Pelaksanaan kegiatan perkantoran manajerial telah berjalan lancar dan belum adanya perubahan OTK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Pelaksanaan ROK tepat jadwal.
3. Jika ada persediaan Uang GU/TU segera memberitahukan kepada Penanggung Jawab untuk memasukan perencanaan secepatnya supaya bisa cepat diproses dan realisasi bisa tercapai.

D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBERDAYA BRPBAPPP

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam.

Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat perencana untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Hasil perhitungan efisiensi anggaran BRPBAPPP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 49. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRPBAPPP Triwulan I Tahun 2025

Unit Kerja	Jumlah IKU	NPSS	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	% Efisiensi Anggaran
BRPBAPPP	17 IKU	111,67	24.445.474.015	97.096.937.000	25,18	86,49

Sumber : Smart DJA

Capaian efisiensi anggaran ini berhasil dicapai melalui perencanaan kinerja yang baik, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan sumberdaya secara optimal. Oleh karena itu, dalam mendukung tercapainya efisiensi anggaran BRPBAPPP juga melakukan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan asset yang tersedia.

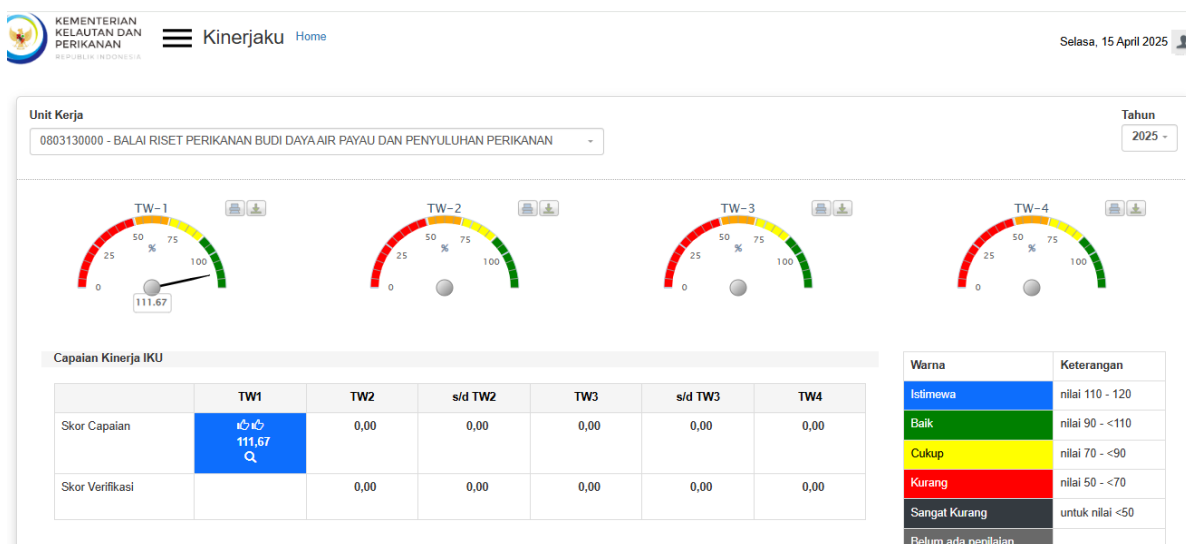
Sebagai satker eks-riset yang masih dalam proses transformasi kelembagaan, BRPBAPPP sudah tidak lagi diperkenankan melakukan fungsi riset. Dan pada tahun 2025 BRPBAPPP fokus pada kegiatan Penyuluhan dan Pemanfaatan asset karena adanya Efisiensi Anggaran sehingga hanya kegiatan Manajerial yang berjalan. Namun demikian BRPBAPPP dengan sumberdaya manusia terampil, dibidang riset dan didukung oleh peralatan laboratorium dan survey yang tersedia, perlu untuk melakukan optimalisasi sumberdaya tersebut. **Efisiensi Pemanfaatan anggaran** seperti anggaran yang diblokir pada triwulan I tahun 2025 pada semua kegiatan perkantoran dan penyuluhan digunakan untuk kegiatan Program Makan Gratis

(MBG). **Efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia** seperti tenaga PPNNP (Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri) dan tenaga PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) yang ada di Laboratorium berperan aktif sebagai tenaga teknisi laboratorium dan sebagai tenaga pelatihan yang diadakan di laboratorium seperti melakukan pelatihan/seminar untuk anak PKL yang ada di Balai Maros sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja BRPBAPPP dan kadang berkolaborasi dengan orang BRIN sebagai narasumber. Dengan demikian, beberapa indikator kinerja dapat secara efisiensi tercapai terutama untuk indikator kinerja nilai PNBP dan Kemitraan. Selain itu, dengan adanya pengoperasian peralatan eks-riset yang tersedia. **Efisiensi asset** juga dapat dicapai baik melalui mekanisme sewa alat laboratorium, sewa lahan tambak, dan lahan Balai yang awalnya sebagai bagian penelitian dijadikan sebagai kegiatan untuk SFV yang dimanfaatkan untuk kegiatannya sehingga bisa menghasilkan dan mendukung capaian nilai PNBP maupun mekanisme Kemitraan. Selain itu, dengan tersedianya infrastruktur perkantoran seperti ruangan aula pertemuan, BRPBAPPP dapat memanfaatkan secara efisien melalui pemanfaatan ruangan dalam fasilitas kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh lingkup BPPSDMKP.

BAB IV PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pengukuran capaian kinerja BRPBAPPP triwulan I tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target tahunan, target triwulan tahun berjalan dan target triwulan tahun lalu dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *Logical Framework Analysis* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPSDM di tingkat korporat triwulan I tahun 2025 sebesar 111,67%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Sumber : Aplikasi Kinerjaku Triwulan I Tahun 2024

Gambar 12. Dashbaord Kinerjaku Level 3 BRPBAPPP

Tabel 50. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	TARGET 2025	TARGET MARET	Capaian MARET	%	TARGET s/d MARET	Capaian s/d MARET	%
S.01	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						113,33			113,33	
IKSK.01.01	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	5,00 5,00	150,00	180,00	120,00	150,00	180,00	120,00
IKSK.01.02	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	168,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00
IKSK.01.03	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	510,00	6,00	10,00	120,00	6,00	10,00	120,00
IKSK.01.04	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	Rupiah Milyar	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,62	0,15	0,20	120,00	0,15	0,20	120,00
IKSK.01.05	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	Unit	Maximize	Nilai Posisi Akhir	43,00	2,00	3,00	120,00	2,00	3,00	120,00
S.02	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK.02.01	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	Paket	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.02.02	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
S.03	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						0,00			0,00	
IKSK.03.01	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	18,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK.03.02	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di	Orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	12,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target MA RET	Capaian MAR ET	%	Target s/d MA RET	Capaian s/d MAR ET	%
	BRPBAPPP (Orang)										
S.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan						110,00			110,00	
IKSK. 04.01	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.02	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	100,00
IKSK. 04.03	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.04	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.05	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.06	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	81,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IKSK. 04.07	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
IKSK. 04.08	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Data berdasarkan pada Aplikasi E Kinerja pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada triwulan I tahun 2025. Ketiga Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh skor kinerja BRPBAPPP pada triwulan 1 tahun 2025 adalah sebesar 111,67%, baru 7 IK yang mencapai target triwulan sebagian IK perhitungannya dilakukan akhir tahun. Adapun IK yang capaiannya melebihi target triwulan I tahun 2025 antara lain : IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU

Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar); IKU Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit); IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%); IKM Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP. Rincian capaian indikator kinerja yang terdapat target triwulan I tahun 2025 pada masing-masing sasaran strategis, sesuai dengan nilai NKO :

1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 5 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - 1) Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 5005 kelompok, capaian triwulan I sebesar 150 Kelompok dari target triwulan I sebesar 180 Kelompok (120%), berstatus biru.
 - 2) Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 168 kelompok, capaian triwulan I sebesar 150 Kelompok dari target triwulan I sebesar 180 Kelompok (120%), berstatus biru.
 - 3) Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Miliar) target tahunan sebesar 1,6238 kelompok, capaian triwulan I sebesar 0,20 Rupiah Milyar dari target pertriwulan sebesar 0,15 Rupiah Milyar (120%), berstatus berwarna biru.
 - 4) Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit) target tahunan sebesar 43 Unit, capaian triwulan I sebesar 2 Unit dari target triwulan I sebesar 3 Unit (120%), berstatus biru.
2. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 2 Indikator Pendukung yaitu :
 - 1) Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)) target tahunan sebesar 1 Paket dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

- 2) Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok) target tahunan sebesar 1 Paket dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
3. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, memiliki 2 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - 1) Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang) target tahunan sebesar 18 Orang dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
 - 2) Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang) target tahunan sebesar 12 Orang dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, memiliki 8 Indikator Kinerja Pendukung, yaitu :
 - 1) Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen), target tahunan sebesar 1 Dokumen dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025
 - 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%), target tahunan sebesar 85% dan capaian triwulan I sebesar 85% dari target triwulan I sebesar 85% (100%), berstatus hijau.
 - 3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 92 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan persemester tahun 2025.
 - 4) Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 81 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
 - 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai), target tahunan sebesar 71,50 Nilai dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.
 - 6) Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks), target tahunan sebesar 81 Indeks dan belum ada capaian karena pengukurannya dilakukan persemester tahun 2025.

- 7) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%), target tahunan sebesar 80% dan capaian triwulan I sebesar 100% dari target triwulan I sebesar 80% (120%), berstatus biru.
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%) target tahunan sebesar 80% dan belum ada capaian karena pengukurannya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025 sebesar 111,67%, sedangkan pada tahun 2024 capaian NKO sebesar 116,37% maka dapat disimpulkan bahwa NKO BRPBAPPP mengalami penurunan sebesar 4,7% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan karena adanya pembagian Indikator Kinerja Penyuluh sesuai dengan jenjang fungsional penyuluh dan adanya pengurangan anggaran dari Eselon I.

B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Selama tahun anggaran triwulan I tahun 2025 ada beberapa permasalahan yang dihadapi BRPBAPPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yakni :

1. IKU dengan target tahunan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan perlu pengawalan yang ketat, disiplin dengan baik sehingga bisa dipastikan bahwa capaian akhir tahun dapat meningkat capaiannya sesuai target yang telah ditetapkan.
2. IKU yang memiliki capaian yang berwarna hijau dengan capaian 90-110 diusahakan untuk bisa memiliki capaian Istimewa (biru) dengan capaian lebih dari 120% dengan melakukan monitoring agar tidak terjadi penurunan pada tahun berikutnya.

C. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Melaksanakan pemantauan secara rutin terhadap capaian seluruh Indikator Kinerja melalui pengukuran capaian kinerja setiap triwulan dan laporan kinerja setiap triwulan.
2. Memastikan Katimja Manajerial dan Katimja Penyuluhan dapat meningkatkan capaiannya yang memiliki tanggung jawab Indikator Kinerja dan bisa meningkatkan capaiannya untuk tahun berikutnya.

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Triwulan I tahun 2025 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk triwulan I tahun 2025 bahkan terdapat 5 IK yang capaiannya memiliki kategori istimewa atau tercapai lebih dari 110% dan 2 IK yang capaiannya 100% kategori baik. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya, namun BRPBAPPP tetap melakukan tuisi sesuai dengan arahan dan pendanaan dari pusat. Pada kontrak kinerja terdapat peta strategi (strategy map) dengan 4 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Semua IKU yang telah ditargetkan mampu direalisasikan 100% bahkan beberapa telah tercapai jauh melebihi ekspektasi Balai pada triwulan I tahun 2025. Adapun IK yang capaiannya melebihi target triwulan I tahun 2025 antara lain : IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok); IKU Nilai PNBPN Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar); IKU Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit); IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%); IKM Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP.

Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan secara optimal berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun ini diharapkan dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan pada triwulan selanjutnya. Sementara untuk beberapa program/kegiatan yang capaian kinerja yang pengukuran kinerja dilakukan pada akhir tahun diharapkan bisa tercapai dengan selalu mengingatkan para penanggung jawab kegiatan

sehingga bisa optimal capaian kinerja pada akhir tahun 2025. Sehingga untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Balai, masih perlu dilakukan perbaikan sarana dan penambahan sarana selain itu diperlukan dukungan seluruh SDM yang ada dan masyarakat sekitar, melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat.

Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah riset perikanan budidaya air payau dan penyuluhan perikanan sehingga capaian kinerja dari BRPBAPPP ini tidak hanya menjadi laporan saja, namun diharapkan benar-benar dapat memberikan dampak serta dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja triwulan I tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BRPBAPPP. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRPBAPPP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan membentuk pemerintahan yang baik (Good Governance) di lingkup BRPBAPPP. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk melaksanakan amanah BRPBAPPP ini, sehingga diharapkan capaian kinerja Balai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

L A M P I R A N

PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513267
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdmi@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
PENYULUHAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A. Indra Jaya Asaad**

Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan


A. Indra Jaya Asaad

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BRPBAPPP (Kelompok)	5.005
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan kelasnya oleh BRPBAPPP (Kelompok)	165
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BRPBAPPP (Kelompok)	510
		4	Nilai PNBP Satker BRPBAPPP (Rupiah Milyar)	1,6235
		5	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BRPBAPPP (Unit)	43
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	6	Media Penyuluhan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BRPBAPPP (Paket)	1
		7	Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang diterapkan oleh BRPBAPPP (Kelompok)	3
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	8	Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BRPBAPPP (Orang)	15
		9	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BRPBAPPP (Orang)	12
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10	Kemitraan yang Disepakati dan/atau Ditindaklanjuti di Satker BRPBAPPP (Dokumen)	1
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRPBAPPP (%)	55
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	92
		13	Penilaian Mandiri SAKIP BRPBAPPP (Nilai)	51
		14	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRPBAPPP (Nilai)	71,5

	15	Indeks Profesionalitas ASN BRPBAPPP (Indeks)	81
	16	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRPBAPPP (%)	80
	17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di BRPBAPPP (%)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5.854.151.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	91.883.143.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan		97.737.294.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama
Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan


A. Indra Jaya Asaad